

Maret 2011

PROGRES



MEDIA KOMUNIKASI TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Memberdayakan Masyarakat Melalui PNPM



**Instrumen Utama Penanggulangan
Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat**

**PNPM Peduli
untuk
Masyarakat Marjinal**



SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT KEMISKINAN



TNP2K

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

INSTRUMEN UTAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KELOMPOK PROGRAM I

BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA

TUJUAN:

Mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

KELOMPOK PROGRAM II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TUJUAN:

Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

KELOMPOK PROGRAM III

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL

TUJUAN:

Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Sekretariat TNP2K :
Grand Kebon Sirih Lt 4-6,
Jalan Kebon Sirih No 35
Jakarta Pusat 10110
• Telp 62-21-3912812
• www.tnp2k.wapresri.go.id





Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera merupakan cita-cita yang ingin dicapai bangsa ini. Berbagai upaya ke arah itu terus dilakukan. Mulai dari pemerintahan orde lama hingga sekarang. Tujuannya satu, agar Indonesia menjadi negara maju, sejahtera, makmur, dan berkeadilan.

Herbagai program pembangunan pun terus diwujudkan untuk mencapai tujuan itu. Misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan November 2007 lalu.

Kedua program tersebut sejatinya merupakan bukti nyata bahwa pemerintahan kabinet ini sangat peduli dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama sekali untuk mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Dalam program KUR misalnya, tahun 2010 secara nasional telah disalurkan sebesar Rp 17,7 triliun. Sedangkan jumlah debitur penerima KUR telah mencapai 3,6 juta unit usaha dan koperasi. Jika dilihat dari sebaran geografis, KUR sudah terealisasi di 33 provinsi.

Andai saja setiap debitur KUR rata-rata dapat mempekerjakan dua orang tenaga kerja baru, maka

melalui KUR akan terserap sekitar 7,2 juta orang. Penyerapan tenaga kerja itu cukup signifikan. Bandingkan saja dengan angka pengangguran terbuka yang ada di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang jumlahnya masih sebanyak 9,25 juta orang.

Sedangkan untuk Program PNPM Mandiri telah menjangkau hampir seluruh daerah di Indonesia. Pada tahun 2010, PNPM telah mencakup 6.321 kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 11.834 triliun. Desa yang telah terjangkau program ini sudah mencapai lebih dari 50 ribu desa yang tersebar di pelosok negeri.

Memang harus diakui, dari dua program besar pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut masih banyak yang harus ditingkatkan. Karena itu, untuk beberapa tahun ke depan, tampaknya kedua program tersebut masih akan menjadi andalan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk negeri ini.

Selain informasi tentang kedua program besar tersebut, tim redaksi kali ini juga menyajikan kabar dari daerah seputar keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Dan tentu saja ada informasi lainnya yang bermanfaat untuk Anda.

Selamat membaca. ■

Belindung:
Wahl President R.

Penasehat:

- Senawarni W
- Deputy Senawarni W
- Staf Khusus Wapres

Penanggung Jawab:
Kecala Setiawan TAPAK

Pemimpin Redaksi :
Hanna Kurniasari

Redaktur Pelaksana :
Wahono H. Lery

Star Redaksi :
Dhany Harjito
E. Nurman

Tata Letak / Artistik :
Sugawadi

Alamat Redaksi:
Sekretariat TH218

Ged. Grand Kebon Sirih Lt. 4
Jalan Kebon Sirih No. 31
Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3912812
Fax. 021-3912811, 3912513
E-mail: info@keanekaragaman.org

Redaksi menerima tulisan, puisi, foto dan surat pembaca yang dikirim satu minggu sebelumnya, penerbitan tulisan maksimal 2 halaman tulisan. Untuk tulisan dan puisi panjang 5.000 karakter dengan disertai foto pribadi dan keluarga

Daftar Isi

4-18 Laporan Utama



Sejak diluncurkan program PNPM Mandiri telah banyak membantu warga miskin untuk meningkatkan kesejahteranya.



Mengatasi permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi.



29 Kabar Daerah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi daerah berkembang. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut sesuai dengan kondisi riil dan potensi yang ada di tiap-tiap daerah.

33 Kabar Daerah

Meningkatkan sumberdaya manusia merupakan salahsatu tujuan dari pemerintah pusat dan daerah dalam menyejahterakan rakyat. Sarana pendidikan jadi hal yang tak bisa dipisahkan untuk mewujudkannya. Perpustakaan sebagai tempat mencari informasi bagi masyarakat sudah sepatutnya dimiliki setiap daerah.

37 Kabar Daerah

Dengan semangat membangun negeri kita wujudkan masyarakat Kabupaten SBT yang rukun, aman, adil, maju, dan sejahtera. Satu motivasi saya, mengubah Kabupaten SBT dari keterisolasian, miskin, dan terbelakang menjadi kabupaten yang punya daya saing dan diperhitungkan. (Abdullah Yanah, Bupati Seram Bagian Timur)

41 Jendela Nusantara

Begitu melimpahnya kekayaan alam Papua Barat merupakan modal untuk mendorong perekonomian rakyat. Potensi inilah yang membantu peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Manokwari.



50 Rendezvous

Seluruh "gumung nasi" warna kecoklatan menjulang diatas panggorengan besar. Bau bumbu kari bercampur daging kambing merembak disekitarnya. Menggugah selera ingin mencoba. Itulah nasi goreng kambing Kebon Sirih yang terkenal seantero Jakarta.



Memberdayakan Masyarakat Melalui PNPM

Oleh EKO CAROKO

Sejak diluncurkan program PNPM Mandiri telah banyak membantu warga miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Wajah gembira dan ceria akhir-akhir ini diperlihatkan oleh Sirajuddin, warga Dusun Burung, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pasalnya kini ia bersama 113 rumah warga di dusunnya bisa menikmati hiburan dan memperoleh informasi dari pesawat televisi dan juga radio. Sejak Dusun Burung berdiri 50 tahun yang lalu, baru kali ini menikmati aliran listrik. Ini terjadi setelah warga di desa itu berhasil membangun

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) yang membangkitkan energi listrik ke rumah mereka. Pembangunan PLTMH ini merupakan salah satu kegiatan yang dibiayai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

PNPM Mandiri pada hakikatnya adalah program penanggulangan kemiskinan nasional yang dijalankan oleh pemerintah untuk menurunkan kemiskinan, melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.



Generasi PLTMH di Kecamatan Cimahi, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

www.progres.kemendagri.go.id

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan dari PNPM Mandiri dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan didukung oleh berbagai kalangan atau pemangku kepentingan lainnya. Pelaku utama pembangunan adalah masyarakat sendiri.

Latar Belakang

Lahirnya program PNPM ini diawali dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dimulai Indonesia mengalami krisis multidimensi dan perubahan politik pada tahun 1998. Fase pertama PPK (PPK I) dimulai pada 1998/1999-

2002, PPK II dilaksanakan pada 2003-2006, PPK III berjalan awal 2006-2007. Melihat keberhasilan PPK, maka Pemerintah Pusat bertekad untuk melanjutkan upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dalam skala yang lebih luas, salah satunya dengan menggunakan skema PPK.

Sejak 1 September 2006, Program tersebut dikukuhkan oleh Presiden RI sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kota Palu, 30 April 2007.

Melalui PNPM Mandiri, dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dalam program ini masyarakat miskin bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya

penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri pada 2007, misalnya, dimulai dengan PPK sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Ini dilakukan peserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi. Juga, ada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Untuk daerah tertinggal ada Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).

Mulai 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. Selain itu, PNPM Mandiri juga diperkuat dengan berbagai

program pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai departemen dan pemerintah daerah.

Capaian PNPM Mandiri

PNPM ini adalah program terbesar pemerintah untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan pekerjaan dan selaras dengan target pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) dengan memberdayakan masyarakat miskin di Indonesia. Sebagai gambaran dari data yang ada, program PNPM Mandiri telah menjangkau 26.724 desa dari 1.837 kecamatan di 32 provinsi. Angka ini meningkat drastis pada 2008 hingga mencapai 34.031 desa dari 2.230 kecamatan di 32 provinsi di Tanah Air. Sementara itu, untuk tahun 2009, jumlah desa yang mendapat kucuran dana dari program ini sebanyak 50.201 yang tersebar di 3.908 kecamatan.

Program ini secara bertahap telah mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Target penurunan jumlah penduduk berpenghasilan kurang dari 1 dolar AS per hari berpeluang tercapai. Jika pada 2009 jumlah penduduk miskin sekitar 14,15 persen, maka pada 2010 jumlahnya menyusut menjadi 13,3 persen dari total populasi.

Tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana untuk kegiatan PNPM Mandiri sebesar Rp10,5 triliun. Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, pemerintah akan mengupayakan dana untuk PNPM meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, Wapres Boediono sering melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk memantau perkembangan program ini. Saat berkunjung ke Kabupaten Bangka Tengah beberapa waktu

yang lalu, Wapres Boediono mengatakan bahwa program PNPM Mandiri merupakan program yang telah lama dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2007 dan cukup diterima masyarakat. "PNPM dapat diterima secara baik di masyarakat, sebab program ini mengharuskan masyarakat memiliki inisiatif untuk mengembangkan dana bantuan dari PNPM," katanya.

Selain itu, Wapres Boediono juga meminta masyarakat Bangka Belitung dalam jangka panjang tidak hanya mengandalkan perekonomian dari hasil menambang timah. "Suatu daerah itu harus mengandalkan kegiatan perekonomian pada satu kehidupan yang lestari yang bisa berlanjut, dan tidak pada hasil tambang saja," kata Wapres.

Program ini ternyata juga menarik perhatian lembaga-lembaga internasional yang berkecimpung di bidang peningkatan kesejahteraan warga miskin. Pada Desember 2007 misalnya ada kerjasama dengan Bank Dunia. Presiden Bank Dunia Robert R. Zoellick saat itu dalam pidatonya, antara lain, mengatakan bahwa sesuatu yang spesial dari program ini adalah usaha keras pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk bangkit dari kemiskinan. Bank Dunia dan negara-negara donor senang sekali bisa membantu karena percaya dengan program ini.

Baru-baru ini Islamic Development Bank (IDB) meminjamkan dana sebesar USD159,45 juta kepada Kementerian Pekerjaan Umum guna memenuhi target penanggulangan kemiskinan di wilayah perkotaan atau biasa disebut dengan PNPM Mandiri Perkotaan. Manager for Strategy and Programme Management IDB Saliullah Mansoor, mengatakan pinjaman itu merupakan yang kedua setelah sebelumnya

memberikan pinjaman sebesar USD87 juta. Tahap kedua sebesar USD159,45 juta yang akan dicairkan pada tahun ini. Kami mendukung program ini karena PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan menekan kemiskinan melalui kegiatan perekonomian masyarakat padat karya," papar Saliullah.

Di mata IDB, program ini bukan hanya untuk menanggulangi masyarakat miskin, tetapi juga bisa menjadikan penambahan pendapatan pemerintah daerah (pemda). Melalui PNPM Mandiri Perkotaan, akan dibuka banyak lapangan pekerjaan dan unit

"PNPM dapat diterima secara baik di masyarakat, sebab program ini mengharuskan masyarakat memiliki inisiatif untuk mengembangkan dana bantuan dari PNPM."

Wakil Presiden Boediono

kegiatan masyarakat baru yang sekaligus menjadi pemasukan bagi pemda setempat.

Sementara itu Manager Proyek Integrated Community Driven Development, Chandra Situmorang menambahkan, total dana yang telah diterima pemerintah dari 2009-2011 untuk PNPM sebesar Rp5,023 triliun. Dana itu berasal dari dua pinjaman lembaga keuangan internasional, yaitu Bank Dunia dan IDB. Dia mengatakan, dana itu akan diberikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Pendek kata program PNPM merupakan bukti nyata pemerintah yang peduli untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama yang masih tergolong miskin. ■

Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat



Upaya penanggulangan kemiskinan memang tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin.

JOHANNES B. SAMI

Penyebab kemiskinan tidak hanya akibat dari aspek-aspek yang bersifat materialistik semata. Tetapi kemiskinan juga banyak disebabkan oleh kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat bertujuan agar penduduk miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

PNPM Mandiri berawal dari pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, PNPM Perkotaan sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan PPNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan konflik. Dan, sejak tahun 2008, PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur



RIZKI ARIYANTI

Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya.

Selanjutnya, PNPM Mandiri terus diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, di antaranya PNPM Mandiri Perumahan Permukiman, PNPM Mandiri Perkotaan, dan PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan (Kementerian PU), PNPM Mandiri Agribisnis Perdesaan (Kementerian Pertanian), PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan PNPM Mandiri

Pariwisata (Kementerian Pariwisata).

Dalam perkembangannya, beberapa program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, telah diharmonisasikan ke dalam PNPM Mandiri, yaitu PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan, PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus, PNPM Mandiri Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah, PNPM Mandiri Agribisnis Perdesaan, PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, PNPM Mandiri Pariwisata, dan PNPM Mandiri Perumahan Permukiman. Secara bertahap, seluruh program

penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/lembaga akan diharmonisasikan ke dalam PNPM Mandiri.

Bantuan Langsung Masyarakat

PNPM Mandiri telah menjangkau hampir seluruh daerah di Indonesia. Tahun 2009, telah disalurkan fasilitas PNPM dengan besaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di 5 program utama yang dikelola langsung masyarakat, maksimal sebesar Rp3 miliar per tahun.

Untuk 2010, PNPM mencakup 6.321 kecamatan dengan alokasi BLM sebesar Rp11,834



triliun. Komposisinya, APBN sebesar Rp. 9.203 triliun dan APBD sebesar Rp. 2.631 triliun. Alokasi PNPM Mandiri 2010 ini lebih kecil dibanding 2009, hal ini disebabkan ada beberapa kecamatan yang sudah tidak lagi menerima program karena telah menerima BLM selama tiga tahun berturut-turut sehingga kecamatan tersebut dipandang telah mandiri. Namun kecamatan-kecamatan tersebut tetap didampingi dengan menyediakan bantuan teknis yang diperlukan sehingga proses pemberdayaannya tetap berjalan.

PNPM Berlanjut Hingga 2014

Sementara itu, saat berlangsungnya Sidang Kabinet, Terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di

Secara bertahap, seluruh program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/ lembaga akan diharmonisasikan ke dalam PNPM Mandiri.

Kantor Presiden, akhir tahun 2010. Menko Kesra Agung Laksono menjelaskan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan PNPM Mandiri hingga 2014. "PNPM Mandiri merupakan bagian dari program BLM yang dibentuk

pemerintah untuk membantu masyarakat miskin. Dan, hasilnya positif," kata Agung Laksono didampingi Mendiknas M Nuh dan Menkes Endang Rahayu Sedyantingsih.

Menurut Agung, PNPM Mandiri merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang diketahui berhasil dan manfaatnya luar biasa, terutama untuk mendorong ekonomi masyarakat. Program ini semula berlangsung tiap tiga tahun berturut-turut di satu daerah, namun karena masih banyak wilayah yang miskin maka perlu terus dievaluasi. "Pertimbangannya karena masih ada kantong-kantong kemiskinan dan belum ada, keselapan uluh dari daerah, terutama mengaitkan dana dari pusat, maka Bantuan

Langsung Masyarakat dalam rangka PNPM tidak jadi *face out*, tapi diteruskan sampai 2014. Seharusnya, PNPM Mandiri selesai 2010," ujar Agung.

Menurut Agung, kelanjutan PNPM hingga 2014 ini nantinya akan menjangkau seluruh kecamatan. "Jadi sesuai programnya, sebenarnya hanya tiga tahun 2007, 2008, 2009, sehingga 2010 sudah selesai. Namun, kebijakan Presiden program ini harus dilanjutkan karena masih diperlukan. Hal tersebut mengingat daerah belum siap gantikan program dari pemerintah pusat ini. Jadinya, BLM dilanjutkan sampai 2014 untuk seluruh kecamatan," katanya.

Agung menyadari APBN akan terbebani. "Hal ini tetap dapat dijalankan. Ini merupakan pilihan terbaik, tentu dengan catatan bahwa *ownership* program dipertuas, bukan hanya pemerintah pusat dan gubernur, tapi juga masyarakat desa merasa memiliki program karena ini dituntut dan direncanakan, diawasi, dan dilaksanakan rakyat sendiri," tegasnya.

PNPM Mandiri selama ini disebut-sebut terkondala oleh pemerintah daerah yang tidak mau mengeluarkan dana pendamping. Menanggapi hal itu, Agung mengatakan, sebenarnya tidak ada daerah yang tidak mau, hanya kemampuannya terbatas, sehingga mereka tidak mau untuk mengantikan anggaran pusat.

Dalam satu kecamatan, penentuan penggunaan dana di desa yang mendapat PNPM Mandiri itu melibatkan daerah setempat. "Apakah untuk saluran pembuangan, jalan setapak, pompa air, semua ditentukan masyarakat setempat," kata Agung Laksono.



PNPM Mandiri Perkotaan membimbing masyarakat agar menjadi pengusaha mandiri.

Dia menambahkan, dana yang dikucurkan besarnya sekitar Rp 11,5 triliun per tahun. Diharapkan (setelah) selesai 2014, daerah-daerah tetap melanjutkan untuk pemerintahan yang akan datang tapi sudah dikanfikan oleh anggaran daerah. Dengan demikian PNPM Mandiri diharapkan mampu mendorong ekonomi daerah sampai mampu biaya sendiri.

Mengenai informasi bahwa

PNPM Mandiri bersumber dari utang World Bank, Mendiknas M Nuh menjelaskan, APBN sumbernya dari pajak dan nonpajak.

"Yang nonpajak bisa dari hibah dan pinjaman luar negeri, semua di-blended jadi APBN, termasuk di Diknas ada pinjaman luar negeri tapi tidak penting karena di-blended di APBN, jadi tidak relevan sumbernya dari A atau Z, yang jelas dari APBN," katanya. ■



Perwakilan dari Gelihi kelompok Waria pada peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli.

PNPM Peduli untuk Masyarakat Marjinal

OLEH UTOMO HARITO

Masalah masyarakat marjinal sudah saatnya ditangani lebih serius. Untuk itu pemerintah mencari jalan keluar agar masyarakat marjinal mendapat tempat yang lebih layak di masyarakat.

Melihat hal ini, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli. Program tersebut bertujuan untuk membantu

masyarakat marjinal atau kaum yang terpinggirkan.

PNPM Peduli ini bertujuan untuk menjangkau para kelompok-kelompok marjinal atau kelompok yang kurang didengar suaranya dan terabaikan, sehingga dapat turut serta berkontribusi terhadap pembangunan sesuai dengan hak-hak kehidupan mereka.

"Terutama untuk kelompok marjinal, seperti anak-anak bermasalah atau anak jalanan. Bahkan kelompok waria yang terkadang sering dihinai, dimarginalkan. Ini diberikan kesempatan pada mereka untuk menentukan sendiri programnya," ujar Agung dalam acara peluncuran PNPM Peduli di Galeri Nasional Indonesia Jl Medan Merdeka Ti-

mur No 14, Jakarta, Rabu (23/3).

Menurut Menko Kesra, yang akan dijangkau oleh program ini adalah kelompok anak-anak jalanan, yatim piatu, fakir miskin, penderita HIV/AIDS, kelompok etnis minoritas, kelompok masyarakat adat minoritas, penderita cacat, perempuan kepala keluarga, anak-anak dan orang dewasa korban trafficking, korban kekerasan, korban konflik dan hukum, petani tanpa lahan, nelayan tanpa perahu, kelompok transgender, mantan waria, mantan narkoba yang dianggap sampah masyarakat, dan lainnya.

Tidak hanya itu, PNPM Peduli juga bertujuan untuk membantu mengangkat harkat martabat kaum marjinal.

"PNPM Peduli ini untuk memulihkan harkat martabat dan keyakinan mereka dengan memberikan keterampilan dan meningkatkan taraf kehidupan mereka," kata Agung.

Dengan PNPM Peduli ini pula kaum marginal harus dipastikan mendapat akses perekonomian dan pelayanan dasar.

"Program ini juga memastikan agar mereka mendapatkan akses perekonomian dan pelayanan dasar yang sudah seharusnya mereka terima," katanya. Sasaran dari program PNPM Peduli adalah mereka yang tidak terakomodasi dalam program PNPM Mandiri sebelumnya.

PNPM Peduli diperuntukkan bagi kelompok marginal di 23 Provinsi. PNPM ini akan diimplementasikan dalam dua tahap. Tahap pertama, dilaksanakan pada tahun 2011-2012 dan kemudian tahap kedua pada tahun 2013-2014.

Menko Kesra, Agung Laksono mengatakan, pada tahap pertama, dana yang disalurkan sebesar US\$5 juta untuk 40 ribu orang di 23 provinsi. Dana hibah PNPM peduli akan disalurkan fasilitas pendukung PNPM Mandiri (PSF) kepada tiga LSM berskala nasional, yaitu Kemitraan, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama, dan ACE (Associate for community Empowerment).

Beberapa donatur yang telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam program ini adalah Pemerintah Australia, Denmark, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, serta Uni Eropa dimana dana hibah ini dikelola oleh Bank Dunia melalui PSF.

"Anggaran PNPM Peduli ini berasal dari dana hibah beberapa donor yang telah berkomitmen berkontribusi dalam program ini yakni Pemerintah

Australia, Denmark, Belanda, Inggris, Amerika Serikat serta Uni Eropa," katanya.

"Jika pengelolaan PNPM Peduli ini baik maka dana akan ditambahkan lagi. Jadi perlu akuntabilitas dan transparansi. Kami tidak pegang uangnya, tapi kami yang menentukan siapa yang membutuhkan," kata Menko Kesra.

Dia menjelaskan, PNPM Peduli bertujuan untuk melengkapi PNPM Mandiri yang sudah ada sebelumnya dengan memanfaatkan keunggulan lembaga

Setiap kelompok, lanjut Agung, akan menerima kucuran dana hingga mencapai sekitar Rp 100 juta. "Target yang menerima 40 ribu orang. Diprioritaskan kepada kelompok, bukan individu. Tiap kelompok terdiri dari 25-30 orang dengan menerima hingga Rp 100 juta per kelompok," jelasnya.

Lebih lanjut Agung menjelaskan, dana dari bantuan asing itu juga akan digunakan membantu kelompok marginal dalam berusaha. "Seperti waris, bisa menggunakan uang ini untuk



Pameran foto PNPM Peduli

ga swadaya masyarakat.

Ia menambahkan, bantuan asing ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup kelompok marginal. Maka dari itu, Agung berharap bantuan serupa dapat diperoleh dari donatur lokal. Bantuan PNPM Peduli ini akan diberikan untuk tiap kelompok yang terdiri dari 20-40 orang dalam satu kelompok. "Penyaluran bantuan ini akan diawasi oleh lembaga independen," kata dia.

membeli alat-alat salon, meningkatkan *capacity building*. Saat ini sumbernya dari donor asing, terkumpul 5 juta dolar (Amerika Serikat)," terang Agung.

"PNPM Mandiri Peduli menitikberatkan pada pembentukan karakter dan *capacity building* masing-masing individu. Dengan bermitra dengan organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat di tingkat lokal, diharapkan program ini dapat tepat sasaran," kata Agung Laksono. ■

Sekelumit Kisah Kaum Marjinal



Oleh: UTOMO HARITO

Borah yang sudah mulai menginjak remaja itu menatap kosong ke halaman parkir sebuah gedung pemerintahan. Ditanganinya mencukal sebuah gitar kecil. Andi, nama si pengamen itu terlihat bingung menyongsong masa depannya. Sementara di hadapannya berse-liweran pegawai pemerintahan. Mungkin ia ingin sekali menjadi pegawai yang terlihat rapi, bersih dan terdidik.

Saya menghampirinya dan mengajaknya berbincang. "Kamu tidak sekolah," tanya saya.

"Sudah tidak lagi, hanya sampai Sekolah dasar saja," jawab Andi sedikit malu-malu.

"Kamu tinggal diman?" tanya saya lagi. "Di Pedati, daerah kampung Melayu, bersama ibu dan empat adik saya. Ayah saya

sudah meninggal beberapa tahun lalu," katanya.

Andi juga menjelaskan bahwa dirinya adalah tulang punggung keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebuah keluarga yang mungkin kurang mendapat perhatian banyak pihak.

"Memang kamu ingin jadi apa kalau sudah besar nanti," tanya saya, semakin ingin tahu cerita anak penyanyi jalanan ini.

"Inginnya sih, jadi pegawai seperti kakak. Tapi kelibatan saya hampir tidak mungkin, paling-paling saya berusaha mencari uang yang banyak, dan kalau sudah banyak untuk modal dagang saja," ujarnya.

Tapi sekarang saya masih harus membantu emak dengan mengamen di terminal Kampung Melayu dari pagi sampai sore. Saya tergabung dalam kelompok penyanyi anak jalanan memakai alat-alat musik

sederhana. Kadang-kadang bila uang yang kami dapat tidak cukup, kami mengamen sampai malam. Saya kehilangan sama emak karena adik-adik semakin hari semakin butuh banyak biaya," ungkap Andi sambil menyeka keringat yang mulai menetes dari dahinya.

"Saya dan teman-teman bergabung dengan rumah singgah di dekat lingkungan kami di Pedati, Kampung Melayu. Ada kakak-kakak pembina di sana yang mengajar kami seperti di sekolah. Kami juga diajari menyanyi. Yang penting kami bisa senang dan mendapat uang untuk membantu orang tua kami," jelas Andi dengan optimis.

Dengan menjalani hidup optimis dan bersyukur, saya berharap rumah singgah dapat mengantarkan saya mencapai cita-cita." Andi mengakhiri percakapan kami dan menghampiri teman-temannya yang memanggil. ■

Presiden Minta PNPM Diawasi Ketat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat mengawasi pengguliran dana dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono.

Pengawasan ini dimaksudkan agar program benar-benar tepat sasaran. Masyarakat diharapkan ikut memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai harapan. Semua kepala daerah juga diinstruksikan untuk memimpin langsung dan mengawasi program peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penegasan langkah pengawasan mengingat kebijakan pemerintah ini

menggunakan dana yang tidak sedikit. Bahkan ke depan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi anggaran penanggulangan kemiskinan bisa makin besar. Tahun 2004 total anggaran peningkatan kesejahteraan Rp 19 triliun, tahun 2005 Rp 24 triliun, tahun 2007 Rp 51 triliun, 2009 sebesar Rp 58 triliun dan tahun 2011 pemerintah menyediakan dana sebesar Rp 100 triliun.

Pada bagian lain, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

dan Pemberdayaan Masyarakat, Sujana Royat, menyangkal anggapan pelaksanaan PNPM Mandiri tidak efektif. Justru, menurut dia, tingkat penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan PNPM Mandiri yang paling rendah, ketimbang program pemerintah lainnya. Penyimpangannya cuma sekitar 0,6 persen. Bandingkan dengan program pemerintah lainnya yang menurut hasil audit BPK tingkat penyimpangannya rata-rata 8-17 persen.



Bambang Widianto

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

PNPM Mandiri sangat efektif untuk menyalurkan anggaran, karena dalam mendistribusikan anggaran PNPM, Kemko Kesra tidak hanya mengandalkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tapi juga mempertimbangkan data riil di masyarakat.

Kendati begitu, proses penyaluran dana PNPM bukan tanpa masalah. Biasanya, instansi pemerintah pusat yang terjun ke daerah kerap jalan sendiri-sendiri dan kurang kooperatif, sehingga menjadi kendala tersendiri di lapangan.

"Umumnya mereka menginginkan agar dana PNPM masuk ke kas Pemda. Tapi kita sudah berusaha menangannya, kalau mereka tidak mau, anggaran kita hentikan. Kita juga memberi penjelasan, kalau program ini untuk masyarakat miskin, jadi dananya langsung disampaikan ke masyarakat," kata Sujana.

Soal Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) yang berasal dari

APBD sebatas dana pendamping, mengingat PNPM merupakan usaha bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengentaskan kemiskinan. "Lagipula besaran DDUB juga tergantung kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah, juga dilihat dari tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Kalau pun daerah tersebut mampu, DDUB yang dikeluarkan maksimal hanya 30 persen," tandasnya.

Khusus PNPM, Sujana menjelaskan, PNPM merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang dibagi menjadi tiga klaster. Yakni klaster I adalah bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga, klaster II pemberdayaan masyarakat dan klaster III pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

"Klaster I diibaratkan dengan menyediakan 'ikan', bantuan langsung bagi masyarakat yang sudah benar-benar tidak berdaya, klaster II dengan menyediakan kail bagi masyarakat agar mereka bisa memberdayakan diri sendiri dan klaster III

bagi mereka yang membutuhkan 'perahu'," katanya.

"PNPM Mandiri ini tujuannya adalah Klaster III yang ditangani dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena itu kami menjadikan PNPM Mandiri sebagai penentian apakah masyarakat miskin ini bisa ditransfer ke Klaster III atau tidak," katanya.

PNPM Mandiri, lanjut dia, diharapkan dapat mendidik masyarakat menjadi berdaya dan mandiri, dimana masyarakat diminta untuk bermusyawarah menentukan proyek apa yang cocok bagi mereka, dan kemudian bergotong-royong melaksanakannya. Dana anggaran PNPM Mandiri pada 2011 mencapai Rp10,5 triliun, turun dari dana PNPM Mandiri 2010 sebesar Rp12 triliun, sementara pada 2009 sebesar Rp9,9 triliun.

Kemiskinan Turun

Sementara itu, Deputi Sekretaris Wapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto menyatakan sasaran untuk mengurangi tingkat kemiskinan telah tercapai, yang ditunjukkan dengan penurunan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. "Sasaran tingkat kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 sebesar 12-13,5% tercapai," kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) itu.

Ia menyebutkan pada tahun 2007 menunjukkan data 16,58% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, lalu angka kemiskinan turun pada 2008 menjadi 15,42%, pada 2009 turun lagi menjadi 14,15%, dan turun kembali menjadi 13,33% pada 2010. Ia merasa optimistis proyeksi pada 2011 ini angka kemiskinan bakal terus menurun menjadi 11,5-12,5%. ■



Memberdayakan Masyarakat lewat KUR

Dan Eng Widiyaputra

Kini tak hanya pedagang dan pengusaha kecil saja yang dapat memanfaatkan kredit ini, para sarjana dan TKI juga bisa memanfaatkannya.

Sejak diluncurkan pemerintah pada awal November 2007, Kredit Usaha Rakyat atau KUR semakin terasa manfaatnya. Itu ditandai dengan makin banyaknya debitur yang tak lain merupakan pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mendapatkan KUR. Kredit yang tersalur melalui KUR dari waktu ke waktu pun terus meningkat.

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan

meluncurkan program KUR ini. Pertama adalah mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Tujuan berikutnya, meningkatkan akses pembiayaan terhadap UMKM dan koperasi. Dan yang terakhir adalah untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. KUR sendiri merupakan kredit atau pembiayaan terhadap pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bentuk pemberian modal kerja



010108

dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha yang produktif.

KUR adalah program yang dicanangkan pemerintah, namun sumber dananya berasal dari dana perbankan. Awalnya KUR disalurkan oleh enam bank yakni bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Bukopin dan Bank Syariah Mandiri. Dalam perkembangannya Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga turut menjadi penyalur KUR.

Diluncurkannya program ini sebenarnya berpijak pada masih minimnya pengusaha UMKM mendapatkan akses perbankan. Padahal pengalaman membuktikan pengusaha UMKM merupakan salah satu pilar penyangga ekonomi nasional. Hingga akhir 2006, jumlah UMKM yang ada di Indonesia mencapai angka hampir 48,8 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, yang telah memperoleh kredit dari perbankan hanya sekitar 39,06 persen atau 19,1 juta unit, sehingga sisanya sejumlah 29,7 juta unit

sama sekali belum tersentuh perbankan. Fakta lainnya tercatat, bahwa 90 persen dari pengusaha UMKM itu merupakan Usaha Mikro yang berbentuk usaha rumah tangga, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis usaha mikro lain yang bersifat informal.

Sejatinya, mereka yang paling banyak menyerap tenaga kerja (*pro job*) dan mampu menopang peningkatan taraf hidup masyarakat (*pro poor*). Walaupun sampai akhir 2006 cukup banyak program pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat perkembangan UMKM melalui berbagai jenis kredit perbankan, namun tampaknya perkembangan berbagai program tersebut belum menaikkan minat perbankan sehingga dampaknya belum dirasakan pelaku UMKM dan masyarakat.

Atas dasar itulah, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 6 tanggal 8 Juni 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rili dan Pember-

dayaan UMKM. Sebagai tindak lanjutnya digagas Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007. Hal ini menandai peluncuran Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM yang biasa disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun meresmikan program ini pada 5 November 2007. Kebijakan penjaminan kredit ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku UMKM dari Koperasi yang telah *feasible* namun belum *bankable*.

Plafon kredit

Pada awal peluncurannya hanya ada satu skema pemberian KUR yakni dengan plafon kredit hingga Rp500 juta. Namun melihat perkembangannya, pemerintah minta agar penyaluran KUR lebih banyak untuk nasabah mikro dengan plafon kredit maksimal Rp5 juta. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 2008, Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menko Perekonomian mengeluarkan Addendum I Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan KUR Mikro dan KUR Linkage Program.

Aturan ini mempermudah UMKM dan koperasi untuk mendapatkan akses kredit dari perbankan. Pasalnya, KUR hanya mensyaratkan agunan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai. Meski begitu, agunan tambahan yang dimiliki UMKM-K pada umumnya kurang sehingga sebagian di-cover dengan program penjaminan. Besarnya coverage penjaminan maksimal 70 persen dari plafon kredit.

Sejak pertama kali diluncurkan, penyerapan KUR di masya-

rakat terus meningkat. Hingga akhir Desember 2010, menurut Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, realisasi penyaluran KUR sudah mencapai Rp15,906 triliun. Angka realisasi ini pun telah melewati target awal yang hanya sebesar Rp15,4 triliun. Itu artinya per 23 Desember 2010 realisasi KUR sudah mencapai 103,3 persen dari target awal.

Secara nasional pada 2010 KUR yang telah tersalurkan mencapai Rp 17,7 triliun. Sementara jumlah debitur yang telah mendapatkan KUR berjumlah 3,6 juta unit usaha dan koperasi.

Jika dilihat dari sebaran geografis, KUR sudah terealisasi di 33 Provinsi. Provinsi penerima KUR terbesar yaitu, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sementara dilihat dari bidang usaha, maka proporsi nilai kredit terbesar ada di sektor perdagangan, pertanian dan hotel. Dengan peningkatan aksesibilitas daerah terpencil diharapkan akan semakin mudah mendapatkan KUR," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta.

Penyerapan Tenaga Kerja

Seperti diketahui salah satu tujuan penyaluran KUR adalah memperluas kesempatan kerja. Dengan adanya KUR pelaku UMKM dan koperasi dapat memperluas atau memperbesar skala bisnisnya. Itu berarti mereka memerlukan tambahan tenaga kerja. Andai saja setiap debitur KUR rata-rata dapat mempekerjakan dua orang tenaga kerja baru, maka melalui KUR ini

dapat menyerap sekitar 7,2 juta orang. Penyerapan tenaga kerja itu cukup significant, bandingkan saja dengan angka pengangguran terbuka yang ada di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang jumlahnya masih sebanyak 9,25 juta orang.

Lebih jauh Program KUR ini dapat mendorong munculnya pengusaha muda yang memiliki

menurut Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, pengusaha UKM jumlahnya sekitar 400 ribu orang. Sehingga, negeri ini sesungguhnya masih banyak membutuhkan kehadiran pengusaha. Mendorong sarjana menjadi pengusaha UKM sebenarnya merupakan upaya untuk memenuhi target pemerintah yang ingin mewujudkan pengusaha

sebanyak 1 persen dari populasi pada 2014.

Untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, melalui pertumbuhan ekonomi dan sektor riil, Wakil Presiden Boediono berjanji akan melipatgandakan nominal KUR setiap tahunnya Rp 2 triliun. Dengan peningkatan nilai KUR tiap tahun, maka giring rasio dari kredit yang diberikan perbankan kepada usaha kecil dan menengah akan berlipat-lipat. "Supaya giring rasionya meningkat 10 kali lipat, tentu harus dinaikkan sebesar

Rp.2 triliun setiap tahun," kata Boediono. Telah terbukti manfaat KUR sungguh terasa bagi rakyat dan ini bisa mendorong sektor UKM untuk lebih maju lagi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Oleh karena itu, pemerintah akan melipatgandakan terus" ujarnya.

KUR TKI

Bila di awal penyalurannya KUR ditujukan untuk pengusaha, UMKM dan koperasi, dalam perkembangannya pemerintah membuka kesempatan kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bisa memanfaatkan KUR. Pada 15 Desember 2010 lalu, secara resmi Presiden Susilo



bekal intelektual tinggi alias sarjana. Lazimnya sarjana baru berburu pekerjaan dengan mengandalkan ujasahnya. Melalui KUR, sarjana baru, bisa melatih dan mengembangkan jiwa wira-usahanya sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

Para pakar ekonomi menytakan untuk menjadi negara industri maju yang mandiri, sebuah negara membutuhkan kehadiran pengusaha UKM yang jumlahnya minimal 2 persen dari populasi penduduk. Tengok saja di Jepang, Korea Selatan, Amerika, Cina dan Malaysia, telah memiliki pengusaha antara 5persen hingga 15persen dari populasi penduduknya. Saat ini



Bambang Yudhoyono di Surabaya meluncurkan program KUR Bagi TKI. Tujuan adanya program tersebut adalah untuk membantu TKI dalam pembiayaan proses penempatan pekerja di luar negeri. Selain itu, melalui program ini, memastikan TKI ditempatkan dengan kontrak yang jelas, haknya dipenuhi, dan memperoleh pelayanan yang layak. Program tersebut juga diharapkan mendorong TKI bekerja produktif dan mematuhi ikatan kontrak dengan adanya transparansi pembayaran gaji dan potongan melalui perbankan. Selain itu, juga meningkatkan remitansi melalui lembaga keuangan.

KUR bagi TKI memiliki dua skema. Skema pertama, KUR Mikro, yaitu KUR dengan plafon sampai dengan Rp20 juta yang dikenakan suku bunga kredit/margin pembiayaan maksimal sebesar atau setara 22 persen efektif per tahun. Skema kedua adalah KUR TKI Ritel dengan plafon di atas Rp20 juta dikenakan suku bunga kredit/margin

pembiayaan maksimal setara 14 persen efektif per tahun.

Pada tahun lalu (2010) ada enam bank yang menyalurkan KUR ini, yaitu BRI, BNL dan Bank Mandiri. Selanjutnya akan menyusul Bank Tabungan Negara, Bank Bupopin, Bank Syariah Mandiri, dan 13 bank pembangunan daerah, yaitu Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, BPD, DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kabwi, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku, dan Bank Papua, yang ikut menyalurkan KUR untuk TKI ini.

Skema penjaminan dilakukan oleh perusahaan penjamin. Sumber KUR TKI 100 persen berasal dari dana bank pelaksana, sementara pemerintah akan menjamin pengembalian KUR TKI melalui perusahaan penjamin sebesar 80 persen, sedangkan sisanya yang 20 persen lagi merupakan risiko yang ditanggung bank, apabila terjadi kemacetan pembayaran angsuran.

Besarnya pinjaman KUR ini

dapat diberikan maksimal 100 persen dari biaya penempatan yang mencakup biaya pengurusan dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja, serta biaya lain yang diatur lebih lanjut dengan pengaturan Menakertrans. Mekanisme penyaluran KUR TKI adalah TKI mengajukan aplikasi KUR TKI kepada bank dengan dibantu oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau yang dahulu disebut PITKI. Apabila TKI telah memenuhi persyaratan dokumen yang diperlukan, maka bank dapat menyetujui penyaluran KUR TKI. Bank melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin apabila TKI gagal melakukan pembayaran angsuran kredit.

Kendala

Di lapangan penyaluran KUR bukan berarti tidak menemui hambatan. Kendala yang dirasakan dari pihak perbankan dalam menyalurkan KUR adalah sulitnya memperoleh calon debitur yang kredibel. Sedangkan dari sisi debitur, kendala-kendala yang dihadapi UMKM adalah sulitnya pemenuhan aspek legalitas seperti izin usaha, analisis kebutuhan kredit dan agunan tambahan.

Pentingnya KUR dalam mendorong kesejahteraan masyarakat membutuhkan peran berbagai pihak untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi baik perbankan maupun UMKM. Diharapkan adanya ketentuan yang memperlonggar kebijakan perkreditan dalam penyaluran KUR mengingat KUR merupakan program sosial yang masih bersifat komersil.

Semua upaya ini diharapkan mampu mempercepat penyerapan KUR sehingga mendorong pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. ■

Terima Kasih KUR



Banyak sudah pengusaha UMKM yang merasakan manfaat dari program KUR. Mereka pun bisa meningkatkan penghasilan dan mengembangkan usaha. Tingkat kesejahteraan mereka pun terus meningkat.

Oleh: EKO WARDIDNO

Penyaturation KUR tak hanya menyentuh daerah perkotaan atau di daerah yang berada pulau-pulau besar saja. Di pulau yang tak terlalu besar seperti Pulau Bangka pun mendapat "sentuhan" KUR. Selama Januari-Desember 2010 Bank BRI telah menyalurkan KUR ke Kabupaten Bangka sebesar 5,52 miliar. Dana KUR itu telah dimanfaatkan oleh sekitar 1.000 pelaku UMKM.

Usaha yang dibiayai oleh KUR di Kabupaten ini cukup beragam, di antaranya pedagang kelontong, nelayan, pengusaha perahu, jasa perbaikan tele-

pon seluler dan lain sebagainya. Pengusaha umum di sana merasakan betul manfaat KUR. Secara perlahan namun pasti penghasilan mereka mulai meningkat. Mereka pun mulai bisa mengembangkan usahanya.

Lewat program ini jumlah pengusaha UMKM di kabupaten Bangka pun terus meningkat. Pada tahun 2005 jumlah UMKM di sana tercatat 14.836, pada tahun 2010 telah berkembang menjadi 18.789 begitu juga jumlah koperasi disana telah berkembang dari 139 unit (2005) menjadi 189 unit (2010).

Salah satu penerima KUR di Kabupaten Bangka adalah Ibu Ratni, pedagang makanan yang berada di Kecamatan Sungailiat.

Ibu dua anak ini mendapatkan pinjaman KUR sebesar Rp5 juta pada Desember 2010 lalu dengan jangka waktu pengembalian satu tahun. Menurutnya dengan adanya KUR ia bisa mendapatkan tambahan modal dengan murah, dibandingkan bila meminjam ke rentenir bunganya mahal yakni mencapai 20 persen per bulan. "Sementara pinjaman KUR bunganya hanya 1-1 persen dan tidak perlu anggunan," kata Ratni.

Lebih dari itu, proses pencairan dana itu pun cukup cepat hanya butuh waktu empat hari saja. Setelah mendapatkan KUR, omset bisnis kedai makanan Ibu Ratni meningkat. Bila sebelumnya dalam sehari ia hanya mengantongi Rp30 ribu, kini ia

bisa mendapatkan pendapatan Rp60 ribu per hari. Artinya setelah mendapat pinjaman KUR omset bisnis Ibu Rofmi meningkat 100 persen.

Manfaat KUR juga dirasakan oleh Ibu Rosnia, istri nelayan. Ia mendapatkan KUR sebesar Rp10 juta dengan jangka pengembalian selama dua tahun. Dana itu digunakan untuk membeli satu unit perahu beserta mesinnya, seharga Rp12 juta. Menurut Rosnia sebelumnya ia memang

ga Rp300 ribu sekali melaut. Setelah memiliki perahu sendiri pendapatnya meningkat menjadi Rp 2 juta hingga Rp2,5 juta sekali melaut. Bahkan kadang bisa membawa penghasilan Rp6 juta sekali melaut.

Wendi yang membuka usaha perbaikan telepon selular dan alat tambang timah di Jl. Jendral Sudirman Sungailiat. Wendi mendapatkan KUR Mikro senilai Rp100 juta. Jangka waktu pengembaiannya selama 3 tahun dengan cicilan Rp3,8 juta per bulan. Dana KUR itu selain digunakan untuk membeli peralatan penunjang bisnisnya juga digunakan untuk modal usaha penjualan baju. Setelah mendapatkan pinjaman KUR usaha yang digelutinya itu pun terus meningkat. Dari usaha perbaikan telepon selular Wendi mampu meraup pendapatan Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per hari. Sementara dari usaha penjualan bajunya rata-rata per bulan menghasilkan omset Rp3 juta hingga Rp4 juta.

Kisah sukses juga dialami oleh penerima KUR di Kabupaten Sukabumi. Nenda Suhenda misalnya, ia bersyukur bisa merasakan manfaat KUR. Sehari-hari Nenda, 39 tahun, warga Kampung Malinggut RT 02/ RW 03, Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, itu berdagang asongan. Awalnya dia tidak memiliki modal untuk usaha. Setelah mendapatkan pinjaman KUR sebesar Rp3 juta dari BRI Unit Cibadak dengan cicilan Rp284 ribu per bulan selama setahun, usahanya pun berjalan lancar. Pendapatannya kini meningkat. Berkat pinjaman KUR, dia bisa menafkahi keluarganya dengan lebih baik.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan mengharapkan program KUR ini terus berlanjut," ujar Nenda.

Manfaat KUR juga dirasakan Santi, ibu rumah tangga warga Kampung Malinggut RT 04/ RW 05, Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, Sukabumi yang membuka usaha warung. Pada Agustus 2008 dia meminjam KUR sebesar Rp3 juta dari BRI Unit Cibadak, juga dengan cicilan Rp284 ribu per bulan selama setahun. Santi memanfaatkannya untuk tambahan modal usaha. Setelah mendapatkan pinjaman KUR itu, usaha yang dijalankannya mengalami kemajuan. Jika sebelumnya penghasilan Santi hanya Rp25 ribu per hari, kini bertambah menjadi Rp50 ribu.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang menjadi alternatif solusi, tapi banyak yang belum paham prosedur mendapatkan kredit itu. Asop, sopir angkutan perkotaan 09 jurusan Cicurug-Cibadak, berharap mendapatkan KUR karena tanpa agunan. Namun, hingga kini dia belum bisa menikmatinya karena jatah BRI terdekat telah melebihi kuota.

Ibu Euis, warga Kampung Pintu RT 02/ RW 09, Cibadak, Sukabumi, juga mengatakan belum mengetahui adanya Program KUR tersebut. Namun dia berharap kelak juga bisa menikmatinya.

"Saya berharap Program KUR itu bisa dinikmati oleh semua warga Kampung Pintu yang membutuhkan. Saya memiliki warung dan usaha jahit pakalan, tetapi masih saja terbentur masalah modal.

Sementara itu, di Bogor seorang pengelola organ tunggal yang tidak mau menyebutkan namanya, berharap Program KUR juga bisa diberikan kepada masyarakat yang lain, seperti dirinya yang menggeluti usaha bisnis hiburan berupa organ tunggal. ■



Nenda Suhenda (tengah) menjujukkan dagangannya

sudah berniat ingin membeli perahu namun uang tabungannya baru ada Rp2 juta. "Jadi kekurangannya ditutupi oleh KUR," kata Rosnia. Diakui olehnya pencairan dana KUR itu hanya butuh waktu dua hari saja.

Dengan adanya KUR, memang mengubah nasib keluarganya. Tadinya suami Rosnia hanya seorang ABK kapal penangkap ikan dengan penghasilan antara Rp200 ribu hing-

Wakil Presiden Boediono Buka Acara ARF DiREx di Manado

DIANI B. WILSON LUMU

Wakil Presiden Boediono secara resmi membuka acara Asean Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF-DiREx) yang berlangsung di kawasan Mega Mall, Manado pada Maret lalu.

Setelah sukses menggelar acara Word Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Summit (CTS) pada tahun lalu, kini Sulawesi Utara kembali menggelar event skala internasional yang bertajuk Asean Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF-DiREx). Acara yang dibuka oleh Wapres itu dihadiri oleh 27 negara, diantaranya dari ASEAN, Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa.

Jepang, meski sedang terkena bencana tetap mengutus Wakil Menteri Luar Negeri, Makiko Kikuta serta tim lengkapnya, untuk berpartisipasi dalam kegiatan bencana internasional ini. Kehadiran Menlu Jepang ini sangat menarik simpati Pemerintah Indonesia juga peserta ARF DiREx lainnya. Simpati bangsa Indonesia terlihat ketika Wakil Presiden Boediono menyampaikan sambutannya.

Wapres menyampaikan belastingkawa yang mendalam kepada rakyat Jepang. "Seluruh



Wapres Boediono di dampingi Gubernur SH Sarundajang usai membuka secara resmi kegiatan ARF-DiREx Selasa (15/3), di Manado, Sulawesi Utara.

umat manusia di dunia masih terganggu gempa dan tsunami empat hari lalu di Jepang, pada hari sama Aceh alami banjir yang menelan korban nyawa dan harta," kata Wapres.

Wapres Boediono kemudian mengajak tamu undangan untuk berdiri dan mengheningkan cipta untuk para korban bencana. Ia berharap, keluarga korban bencana yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan segera bangkit membangun kerusakan akibat bencana tersebut.

Pada bagian lain, Boediono berharap melalui ARF-DiREx, kita bisa mengatasi bencana dengan lebih baik, terkoordinir dan sistematis.

Selain itu, tambah Boediono, apa yang dilakukan saat ini juga untuk melatih koordinasi

stipil militer. Diharapkan peserta memaksimalkan dan saling berbagi pengalaman. Wapres juga menyuji Sulut yang sudah bisa menjadi tuan rumah yang baik. Ia menilai tentang simulasi evakuasi saat bencana sudah bagus karena berhasil mengungsikan penduduk di 10 pesisir di teluk Manado. "Meski demikian kita harus lebih waspada. Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam kawasan *ring of fire*, dimana bencana gunung meletus, gempa bumi, banjir dan juga tsunami, kerap melanda negara ini," ujarnya.

"Sudah satu hufit wilayah ini masuk di kawasan *ring of fire*, yakni terjadinya bencana-bencana seperti yang melanda Filipina, Myanmar, Australia,



BOEDIONO

New Zealand, juga Jepang. Contohnya, Indonesia pada Oktober lalu, mengalami tiga bencana cukup dahsyat yakni banjir dan tanah longsor di Wasior, gunung meletus di Yogyakarta, dan tsunami di Mentawai, yang mengakibatkan korban jiwa dan juga harta benda," kata Wapres Boediono.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Makiko Kikuta menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan. Terutama bantuan dan dukungan yang diberikan untuk membantu Jepang pulih dari kondisi bencana. "Keputusan untuk meninggalkan Jepang adalah hal yang sangat sulit, namun saya memutuskan untuk datang ke sini memenuhi tanggung jawab kami sebagai ketua bersama," kata Kikuta.

Selain Wapres, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) SH Sarundayang dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya Sarundayang menjelaskan bahwa posisi Sulut berada di lingkungan patahan dan lempengan. Tak heran bila da-

erah ini juga rawan gempa. Itulah sebabnya pemerintah Sulut merasa penting melakukan latihan penanggulangan bencana bagi warganya.

Usai pembukaan, rombongan mengunjungi KRI dr Soeharso. Tepat pukul 11.00, Wakil Presiden tiba di Side Ramp Deck A KRI dr Soeharso dengan seremoni bendera Kehormatan Bintara dan Fall Ripe oleh Pama KRI dr Soeharso. Ia menumpang kapal Gombal Boat milik pasukan katak TNI AL dan diterima oleh Letkol Ari Widiatmoko. Setelah itu Boediono ke Deck F, ruang anjungan yang merupakan posko pengendalian latihan ARF DIREx.

Wapres didampingi Gubernur Sarundayang, sejumlah menteri dan para panglima militer. Sekitar 5-10 menit berada di Deck F, Boediono dan rombongan meninjau Deck C yang merupakan ruang medis dari KRI dr Soeharso.

Deck C yang berada di lantai tiga ini benar-benar mirip rumah sakit mini. Ada ruang UGD, ruang poliklinik gigi, mata, radiologi, dan laboratorium, lengkap dengan fasilitas yang memadai.

Selanjutnya, Wapres kemut-

dian turun ke Deck A, tempat dimana acara makan siang disiapkan. Di Deck A itu, Wapres sudah menunggu para delegasi yang datang dengan diangkut Landing Craft Unit (LCU).

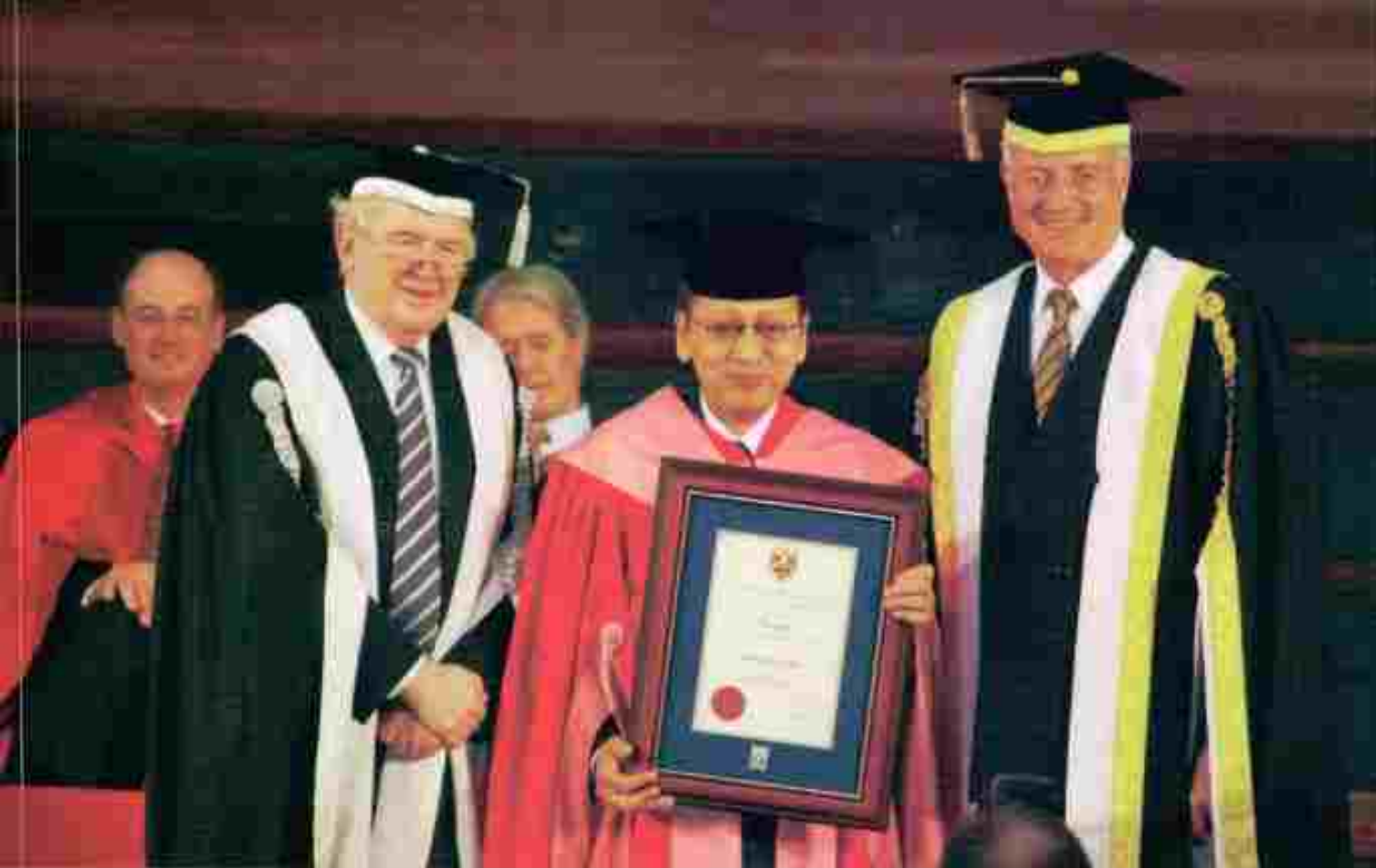
Pelaksanaan ARF DIREx sendiri mendapat sambutan penuh warga Sulawesi Utara. Warga berduyun-duyun menyaksikan langsung acara akbar ini. Cuaca Kota Manado sendiri sangat mendukung kelancaran *opening ceremony* ARF DIREx.

Pukul 09.00 Wapres Boediono yang didampingi Gubernur Sulut SH Sarundayang, tiba di lokasi acara di kawasan Mega Mas dan langsung menuju panggung utama yang didirikan menghadap Teluk Manado itu.

Simulasi Mekanisme Penanganan Bencana dan Tanggap Darurat berlangsung sukses. Aksi penyelamatan korban bencana melalui laut dan udara itu membuat pengunjung agak tegang. Namun, ketika demonstrasi penyelamatan korban berhasil dilakukan, pengunjung pun bertepuk tangan.

Tamu yang hadir dalam acara itu adalah Wakil Menlu Jepang Makiko Kikuta, Dubes Jepang Kojiro Siojiri, Dubes Amerika Serikat Scot Marcel, dan petinggi-petinggi militer negara asing.

Hadir juga para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di antaranya Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menpan dan RB EE Mangindaan, Mensos Salim Segaf Aljufrie, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri DKP Fadel Muhammad, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kasal Laksamana TNI Suparno, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Kepala BNPB Syamsul Ma'arif, dan sejumlah pejabat tinggi sipil dan TNI lainnya. ■



Wakil Presiden Boediono didampingi Chancellor University of Western Australia (UWA) Michael Chaney (kanan) dan Wakil Chancellor UWA Allan Robson menyerahkan piagam penghargaan Doktor Honoris Causa di Perth, Korea (11/3). Penghargaan doktor kehormatan kepada Wapres itu antara lain disebabkan pengabdian dan jasa-jasa Boediono dalam bidang pendidikan dan memajukan masyarakat melalui karirnya selama ini di pemerintahan.

Wapres menerima gelar Doktor Honoris Causa dari University of Western Australia

OMH IWAN HK

Pada pertengahan Maret lalu (10/3) Wakil Presiden Boediono menerima gelar Doktor Honoris Causa dari almahaternya University of Western Australia (UWA).

Upacara pengukuhan yang berlangsung di Winthrop Hall itu berjalan dengan hidmat. Apalagi ketika prosesi pengukuhan itu dilirangi instrumen dari

sebuah organ pipa tua, membuat suasananya terasa anggun.

Ada sekitar 200 tamu undangan hadir pada acara tersebut, di antaranya Ibu Heruwalli Boediono dan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. Tak ketinggalan pula seorang sahabat yang juga teman sekamarnya Wapres Boediono semasa menyelesaikan kuliah di kota Perth tahun 1963 lalu, yakni Abdullah Toha.

Wapres mengatakan bahwa masa studinya yang dibiayai dari beasiswa Colombo Plan selama empat tahun di UWA sangat berpengaruh pada pembentukan pemikirannya. Wapres juga

merasakan sikap bersahabat yang hangat dari warga Perth. Itu sangat membantunya mengesankan diri menghadapi *cultural shock*.

"Yang sangat penting adalah, studi di UWA memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pembentukan sikap saya terhadap sesama manusia dan masyarakat. Ini adalah pondasi bagi pandangan saya berikutnya terhadap dunia," tutur Wapres yang merasa sangat terhormat menerima gelar itu.

Selain gelar Doktor Kehormatan, Wapres Boediono sebelumnya juga mendapat penghargaan sebagai distinguished alumni dari

UWA pada 2007. Pada waktu itu, upacara penghargaan berlangsung di Kedutaan Australia di Jakarta.

Selain di UWA, Wapres melanjutkan studi ke Monash University, Melbourne, Australia, dan mendapatkan gelar Master of Economics pada 1972. Sedangkan untuk program PhD, Wapres menyelesaikannya di The Wharton School at the University of Pennsylvania, Amerika Serikat, 1979.

"Saya juga menjalankan tugas dari Presiden untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Ini program yang sangat penting demi perbaikan kesejahteraan rakyat."

Wakil Presiden Boediono

Kunjungan Kerja sekaligus Nostalgia

Bagi Wapres, ini adalah kunjungan yang penuh nostalgia. Pada 1963, sebagai pemuda penerima beasiswa Colombo Plan bersama sahabat karibnya Abdillah Toha, Boediono mendarat di Perth untuk memulai pendidikan di University of Western Australia (UWA). Kini setelah 48 tahun berlalu, Boediono datang sebagai Wapres RI ke kota dan universitas yang sama. Bukan lagi untuk menuntut ilmu, namun untuk menerima gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa). Sahabatnya Abdillah Toha juga ikut menyaksikannya.

Tak sekadar untuk menerima kehormatan dan bernostalgia, Wapres pun memanfaatkan kunjungan ke Australia kali ini untuk meningkatkan hubungan Indonesia-Australia. Wapres berturut-turut menerima

kunjungan Acting Premier Australia Barat Kim Hames dan Vice Chancellor UWA Prof. Alan Robson.

Dalam kesempatan bertemu dengan Hames, yang juga menjabat Menteri Kesehatan dan Pariwisata Australia, Wapres sempat mendiskusikan pengembangan kacang lupin yang sangat berguna sebagai pengganti kedelai. Di Indonesia, kacang lupin yang kaya protein juga digusakan sebagai campuran kedelai sebagai bahan baku tempe. Diskusi juga merambah ke soal kesehatan yang merupakan spesialisasi Menteri Hames yang juga dokter lulusan UWA.

Sedangkan ketika berdialog dengan Prof. Robson, masalah yang mencuat adalah beasiswa untuk program doktor dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia yang hanya berdurasi tiga tahun. Padahal, rata-rata masa belajar mahasiswa sampai lulus mendapatkan gelar PhD adalah empat tahun. Ini menjadi persoalan yang cukup pelik karena tanpa beasiswa berarti bagi kandidat PhD untuk menyelesaikan kuliah.

Prof. Robson juga menceritakan betapa mahasiswa Singapura dan Malaysia semakin mendominasi komposisi mahasiswa program doktoral di UWA. Mahasiswa Indonesia semakin sedikit. "Tentu kami sangat ingin mendapatkan mahasiswa Indonesia yang lebih banyak," kata Robson.

Bertemu masyarakat Indonesia di Perth

Dalam kunjungannya ke kota Perth, Wakil Presiden Boediono berkesempatan melakukan tatap muka dengan warga Indonesia di sana. Dalam dialognya Wapres kembali mengingatkan bahwa tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia untuk pesimis,

karena kondisi ekonomi kita baik. Pertumbuhan tetap tinggi kendati dampak krisis global masih terasa di banyak negara. Selain itu, kondisi politik Indonesia yang sangat demokratis juga menjadi faktor pendorong.

"Tanpa ada demokrasi, sebuah masyarakat tidak akan menjadi kreatif. Jika kita tidak kreatif sulit untuk tumbuh dan bersaing dalam situasi global seperti sekarang," tutur Wapres.

Tapi, Wapres Boediono juga menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mengawal demokrasi agar kita bisa menyusun aturan main yang baik dan pas untuk demokrasi yang masih muda di Indonesia. Dengan demikian demokrasi kita mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif.

Di tengah iklim politik yang sangat dinamis ini, Pemerintah saat ini terus bekerja untuk memperbaiki kesejahteraan. Wapres misalnya, tetap membantu Presiden menjalankan tugas sesuai Undang-Undang. Dalam hal pembagian kerja dengan Presiden, Wapres menceritakan bahwa tak perlu ada kontrak yang kaku. Antara lain, saat ini Wapres banyak berkonsentrasi untuk mempercepat dan mendorong pembangunan berbagai infrastruktur yang sudah lama tertinggal. Tugas lain Wapres dari presiden adalah mendorong program Reformasi Birokrasi.

Dalam konteks ini Wapres sekaligus juga menjabat sebagai Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. "Saya juga menjalankan tugas dari Presiden untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Ini program yang sangat penting demi perbaikan kesejahteraan rakyat," tutur Wapres. ■

Sumber: by.Mediamakmur.com/wapresnavigil

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Oleh: B. WILSON LUM

Daya saing satu daerah sangat tergantung pada sejauh mana kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerahnya.

Guna meningkatkan kualitas SDM, pendidikan merupakan tonggak utamanya. Selain kualitas SDM, kemajuan suatu daerah pun sangat dipengaruhi oleh adanya sistem informasi dan teknologi (IT). Sebab, kemajuan sistem informasi dan teknologi mengharuskan setiap individu untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilannya. Jika tidak demikian, mewujudkan daerah yang punya daya saing akan sulit terwujud.

Bupati Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, Drs. H. Budiman Arifin, MSi, ketika melakukan kunjungan ke sekolah unggulan SMP Negeri 3 Tanjung Palas, berharap agar pemberian pemerintah, berupa pemberian fasilitas-fasilitas penunjang operasional sekolah dapat dimanfaatkan dengan baik. "Persiapkan diri kita sejak dini agar nantinya bisa menjadi manusia-manusia unggul sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan jaman. Jika tidak demikian maka setiap individu akan tertinggal dan tidak dapat berkembang maju dalam menghadapi masa depannya," kata Bupati.

Menurut Bupati, mengingat

pentingnya persiapan SDM yang handal dalam menghadapi tantangan zaman di era globalisasi seperti sekarang ini, Pemerintah Bulungan telah berupaya melaksanakan peningkatan mutu di berbagai sektor pendidikan. Dunia pendidikan mendapatkan perhatian yang sangat intens dari Pemerintah Kabupaten Bulungan selama beberapa tahun ini. Bentuk perhatian ini pun dapat terlihat dari alokasi dana yang terbentang besar dibanding sektor lainnya.

Sementara itu, dengan keadaan wilayah Kabupaten Bulungan yang terbentang luas menyebabkan Pemerintah Bulungan kesulitan dalam mewujudkan daya saing pendidikan seperti di kota-kota besar. Pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, terutama para pelajar yang ada di Bulungan.

Karena Bulungan memiliki wilayah yang memiliki jumlah anak sungai yang sangat banyak Hal ini menjadi kendala utama bagi pemerintah dalam pemerataan pembangunan, baik secara fisik maupun sumber daya manusianya. Sebagai contoh penyediaan fasilitas belajar mengajar seperti sekolah dan sarana prasarana di setiap kampung.

Namun pemerintah terus menerus melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat (pelajar).

"Terhadap berbagai masalah pendidikan yang ada, itu tidak harus dihindari melainkan dihadapi dan dicari jalan pemecahannya," jelas Budiman.

Bupati Bulungan
Bersama Kadis
Pendidikan
Mengunjungi
di Puskesmas Tanjung
Palas



Dia juga menyebutkan salah satu masalah yang ada di dunia pendidikan Kabupaten Bulungan telah jarak sekolah yang cukup jauh dengan tempat tinggal para pelajar.

Untuk mengatasi masalah tersebut sejak tahun 2009 pemerintah Kabupaten Bulungan telah mengadakan bus sekolah.

"Tahun 2009 Pemerintah Bulungan mengadakan pengadaan bus sekolah sebanyak empat unit dan pada tahun 2010 lalu sebanyak dua unit. Jadi total bus sekolah yang beroperasi kini sebanyak enam buah," jelas Bupati.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, Khaeromuddin mengatakan bahwa saat ini ada empat kecamatan yang sudah mendapatkan bantuan bus sekolah dari Pemerintah Bulungan melalui Dinas Pendidikan. Wilayah-wilayah tersebut, Di antaranya Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan Kecamatan Sekatak. Dari 4 wilayah tersebut Kecamatan Tanjung



Salah satu bus sekolah di Bulungan. Selain menyediakan bus sekolah, Kecamatan Tanjung Palas Utara.

Selon dari Tanjung Palas masing-masing mendapatkan dua unit kendaraan, sedangkan Tanjung Palas Utara dan Kecamatan Sekeloa, masing-masing satu unit bus sekolah.

Menurut Khaerumuddin, pembagian bus sekolah ini berdasarkan skala prioritas, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk (pelajar) dan jumlah sekolah yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Disamping itu juga harus tersedianya infrastruktur jalan yang memadai, sehingga dapat diakses dengan kendaraan roda empat atau bus sekolah itu sendiri.

"Untuk wilayah kecamatan lainnya, seperti Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Timur, Pesisir Hilir, Pesisir dan Bungu, sementara masih dipikirkan dan dicari solusi bagaimana pola yang terbaik untuk memudahkan pelayanan pendidikan ke depannya," jelas Khaerumuddin.

Bagi daerah terpencil dan terisolasi, tambah Khaerumuddin, pemerintah melalui Dinas Pendidikan terus memaksimalkan

layanan pendidikan di desa-desa dengan berbagai macam cara. Program pendidikan tersebut di antaranya membangun sekolah di desa-desa terpencil yang jauh dari kota. Sehingga mungkin kalau ada sekolah yang hanya memiliki jumlah siswa sekitar tigapuluh orang saja (mulai dari kelas satu sampai kelas enam).

Selain itu, ditangan juga rumah dinas bagi guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah seperti itu. Hal ini dimaksudkan agar guru-guru tersebut tidak terbebani transportasi dan betah mengajar.

Untuk diketahui bahwa layanan bus sekolah ini merupakan layanan gratis. Artinya, setiap pelajar tidak dikenakan beban biaya apapun karena semua biaya operasional ditanggung Dinas Pendidikan Bulungan, baik yang terkait gaji sopir bus, bahan bakar minyak (BBM) hingga biaya perawatan kendaraan lainnya. "Dan bus sekolah ini tidak hanya untuk satu sekolah saja, melainkan untuk semua tingkat pendidikan yakni SD, SMP sampai SMU."

jelas Khaerumuddin.

Selain fasilitas kendaraan gratis (bus sekolah), pemerintah Kabupaten Bulungan juga terus berupaya memberikan pelayanan pendidikan maksimal. Salah satunya dengan memberikan bantuan beasiswa dan bantuan operasional sekolah daerah. Tingginya angka kemiskinan menyebabkan pemerintah terus melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan bekal masyarakat, terutama di bidang pendidikan.

Untuk itu, pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah menyelenggarakan bantuan operasional sekolah (BOS) sejak tahun 2001 hingga sekarang. Bahkan, tercatat sejak tahun 2009 sampai tahun 2011 ini dana BOS mengalami peningkatan yang cukup signifikan. "Pada tahun 2010 keseluruhan anggaran BOS yang diberikan sekitar Rp13 miliar. Kemudian pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp14 miliar. "Anggaran BOS tersebut disalurkan pada 230 sekolah, mulai dari tingkat SD, SLTP dan SLTA," kata Khaerumuddin.

BOS sangat membantu siswa dan pihak sekolah dalam memudahkan penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebagai contoh, tambah Khaerumuddin, dengan adanya BOS tidak ada pungutan biaya operasional kepada siswa seperti SPP, OSIS, dan termasuk buku pelajaran bagi siswa serta buku panduan mengajar bagi guru di sekolah.

Ditambahkan Kasubid Pengelolaan BOSDA Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, Tri Endah Prasetyaningih, bahwa pada tahun lam (2010) BOS terealisasi dengan sangat baik yakni yaitu sekitar 95% dari total anggaran. "Dikatakan Prasetyaningih, ada tiga kategori bantuan

INDIKATOR-INDIKATOR YANG MENGGAMBARAKAN AKSES PENDUDUK TERHADAP FASILITAS KESEHATAN DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008

Kabupaten/Kota	Jarak Rata-rata Menuju Rumah Sakit Terdekat (Km)	Jarak Rata-rata Menuju Rumah Sakit Berakut Terdekat (Km)	Jarak Rata-rata Menuju Puskesmas Terdekat (Km)	Jarak Rata-rata Menuju Puskesmas Terdekat (Km)	Jarak Rata-rata Menuju Puskesmas Terdekat (Km)
PASIR	81.74	81.74	81.55	18.85	39.86
KUTAI BARAT	81.85	85.91	88.66	32.35	49.29
KUTAI KARTANEGARA	57.84	81.88	88.82	20.06	24.03
KUTAI TIMUR	85.81	88.81	73.83	35.33	81.32
BERAI	72.14	72.75	77.99	43.86	72.72
MALINAU	57.74	88.71	78.58	34.80	66.98
BULUNGAN	75.67	92.68	86.25	13.71	71.66
NUNUKAN	61.38	88.83	84.07	42.31	63.32
PENAJAM PASEY UTARA	55.32	86.88	80.48	12.13	18.91
KOTA BALKANAN	85.81	88.81	57.63	22.94	88.87
KOTA SAMBANDA	5.16	5.01	51.62	1.00	1.87
TARAKAN	7.58	3.32	28.75	4.12	8.85
KOTA SONTANG	5.48	6.35	82.85	1.86	8.88

Sumber: BPS, 2009

INDIKATOR AKSESIBILITAS PELAYANAN DAN KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN - SEKOLAH DASAR (SD/MI)

Nama Kabupaten	Rasio Siswa Per Kelas	Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan					Ketersediaan Fasilitas Pendidikan						
		Jumlah Siswa	AKN	AKR	Jarak Menuju Sekolah	Jumlah Siswa	Rasio Siswa/ Kelas	Rasio Siswa/ Kelas	Rasio Siswa/ Kelas	Rasio Siswa/ Kelas	Rasio Siswa/ Kelas	Rasio Siswa/ Kelas	
							(000)	(0000)	(0000)	(0000)	(0000)	(0000)	
							(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	
BERAI	27.822	25.048	114,13	93,10	85,74	218	133	22	0,75	1,80	1,18	2,23	
KUTAI BARAT	25.115	25.080	114,10	93,10	85,74	218	133	22	0,75	1,80	1,18	2,23	
KUTAI KARTANEGARA	25.115	25.080	114,10	93,10	85,74	218	133	22	0,75	1,80	1,18	2,23	
KUTAI TIMUR	25.115	25.080	114,10	93,10	85,74	218	133	22	0,75	1,80	1,18	2,23	
BERAI	25.478	21.725	117,11	95,54	88,34	156	138	19	0,70	7,40	1,41	2,55	
MALINAU	8.573	10.313	116,19	94,94	86,79	46	119	16	0,64	4,23	0,69	18,71	
BULUNGAN	17.118	16.544	121,42	92,06	89,82	121	131	21	0,71	6,40	1,01	0,90	
NUNUKAN	18.542	21.327	121,42	89,33	85,78	125	111	21	0,85	7,41	6,56	22,38	
PENAJAM PASEY UTARA	14.510	19.216	117,41	95,78	84,55	108	192	21	0,71	7,38	1,17	0,60	
TARAKAN	5.905		11,71	26,18								3,08	
KOTA BALKANAN	14.510	12.208	119,73	97,68	88,32	164	568	21	0,75	13,51	1,29	0,03	
KOTA SAMBANDA	20.477	19.280	119,12	98,17	98,10	223	323	30	0,72	11,89	0,11	0,09	
KOTA TARAKAN	18.019	21.827	109,11	98,39	89,12	19	370	11	0,66	11,46	1,14	2,18	
KOTA SONTANG	16.718	17.711	118,50	98,58	98,50	31	540	10	1,68	11,41	1,13	4,08	
Kalimantan Timur	209.980	425.484	117,14	93,55	88,88	2.148	133	22	0,64	7,41	1,15	16,61	

Sumber: BPS, 2009

perasional sekolah yang diterapkan di Kabupaten Bulungan, masing-masing BOS yang berasal dari pemerintah pusat, BOS yang berasal dari pemerintah provinsi, dan BOS yang berasal dari Kabupaten Bulungan.

Adapun rincian penggunaan dana BOS. Masing-masing dari pemerintah pusat diperuntukkan untuk membantu operasional sekolah mulai tingkat SD sampai dengan SLTP. Untuk dana BOS yang berasal dari pemerintah provinsi, diperuntukkan bagi operasional tingkat SLTA dan sederajat lainnya. Sementara BOS yang berasal dari pemerintah Kabupaten Bulungan diperuntukkan bagi semua tingkat pendidikan yaitu mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai SLTA.

Untuk mahasiswa, pemerintah Kabupaten Bulungan memberikan beasiswa prestasi kepada 208 orang mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dan tingkatan, mulai diploma sampai sarjana (S1 dan S2) sejak tahun 2009 lalu.

"Selain biaya pendidikan bagi mahasiswa penerima beasiswa berprestasi ini, Pemerintah Kabupaten Bulungan juga menanggung seluruh kebutuhan mahasiswa tersebut, baik biaya hidup sehari-hari, biaya kesehatan, biaya tempat tinggal, foto kopi dan lain-lain," kata Prasetyaningstih menjelaskan.

Selain dana BOS, ujar Prasetyaningstih, ada juga insentif yang diberikan kepada para tenaga pengajar (guru), baik itu guru negeri ataupun swasta mulai dari guru pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai guru sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dengan bantuan minimal satu juta.

Namun, tambah Prasetyaningstih, untuk program ini ada kriteria bagi guru yang mende-

patkan insentif ini, dimana guru tersebut harus memiliki NUPTK (sejenis nomor induk kepegawaian) daerah dan harus sudah mengajar *full time* selama 4-5 tahun.

Kesehatan

Hal lain yang sangat berpengaruh dalam upaya mewujudkan daerah yang memiliki daya saing dan unggul adalah faktor kesehatan. Diyakini Bupati

Budiman, bahwa kesehatan juga memegang kunci penting dalam mewujudkan daerah yang punya daya saing. "Agar bisa berdaya saing dan unggul, kita juga harus memiliki SDM yang sehat (jasmani dan rohani)," tandas Bupati.

Sasaran pembangunan kesehatan yang di antaranya untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, mutlak diwujudkan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bulungan meluncurkan program peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama yang berada di desa (daerah) terpencil.

Beberapa indikator yang mencerminkan keberhasilan peningkatan akses pelayanan kesehatan antara lain adalah meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan menurunnya penderita kurang gizi pada anak balita.

Untuk memaksimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat, Dinas Kesehatan Bulungan juga telah menyediakan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) hampir di seluruh desa yang ada. Setiap Puskesmas yang ada di kecamatan disertakan seorang dokter umum untuk

memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara untuk Pustu minimal dilengkapi satu orang perawat dan satu orang bagian administrasi.

Menurut Kadis Kesehatan Bulungan, dokter Idenawan Budi Santoso, bahwa pelayanan Puskesmas diatur sesuai dengan fungsinya, di antaranya (yang utama) preventif dan kuratif.

"Di Kabupaten Bulungan sampai saat ini sudah tersedia sekitar 12 Puskesmas yang dilengkapi dengan ruang rawat inap, rawat jalan yang dibuka selama 24 jam," ungkap Budi Santoso.

Selain itu, pemerintah juga mengadakan program Desa Siaga. Dalam program ini dilengkapi dengan Posyandu. Desa Siaga merupakan program pemberdayaan masyarakat sehat dengan memberdayakan masyarakat di desa itu sendiri sebagai pelaku kesehatan, terutama dalam hal menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

"Ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam menciptakan lingkungan sehat. Antara lain dengan membersihkan jentik-jentik nyamuk, dan membersihkan jamban, juga melakukan

donor darah," jelas Budi Santoso.

Bagi masyarakat desa terpencil, pemerintah menyediakan ambulan desa. Fasilitas ambulan desa ini berasal dari kendaraan masyarakat setempat. Pemerintah menanggung operasionalnya melalui jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

"Ada beberapa istilah kesehatan di Kabupaten Bulungan berdasarkan tingkatnya, masing-masing desa siaga dan desa sehat (fasilitas desa) serta kecamatan sehat juga kabupaten sehat untuk tingkat kecamatan dan kabupaten," demikian Budi Santoso.

Terkait harapan kedepan, Budi Santoso mengharapkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bulungan dapat berjalan sesuai dengan target pemerintah dalam mencapai millenium development goals (MDGs) sampai pada tahun 2015 yang akan datang.

Yang menjadi pusat perhatian MDGs ialah masalah kemiskinan (giri buruk), kematian bayi dan balita, kematian ibu dan penyakit menular lainnya, ini berdasarkan Perda Kesehatan tentang kesehatan ibu, balita dan bayi baru lahir (KIBBLA), jelas Budi.



PNPM Kelautan dan Perikanan

Menyejahterakan Masyarakat Miskin Pesisir

ONELI WANDHAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi daerah berkembang. Untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut sesuai dengan kondisi riil dan potensi yang ada di tiap-tiap daerah.



Bupati Raja Ampat Marcus Wamira menyerahkan paket bantuan perlengkapan perikanan.

Sudah beberapa bulan terakhir ini masyarakat kampung Bent. Distrik Ayau Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, terlihat begitu antusias turun ke laut. Baik laki-laki maupun perempuan sejak pagi buta sudah keluar rumah menuju pantai yang tak jauh dari tempat tinggal mereka. Yang perempuan sibuk merentang tali panjang dan mengikat bibit rumput laut dalam jarak tertentu. Sedangkan para lelaki memilah bibit rumput laut yang akan dikat. Mereka bahu membahu melakukan kegiatan budidaya rumput laut. Bantuan yang diberikan pemerintah lewat program PNPM Kelautan dan Perikanan, berupa bibit rumput laut dan tali panjang sangat menolong bagi peningkatan usaha rumput laut mereka.

Dengan adanya bantuan langsung masyarakat di sektor kelautan dan perikanan

ini, masyarakat setempat telah mampu meningkatkan panen rumput lautnya sekitar 500 kg per KK. Artinya pendapatan per KK menjadi sebesar Rp 1,5 juta per bulan, jelas Kahid Usafa Tani dan Nelayan Kabupaten Raja Ampat, Windy Hartono kepada PROGRES. Melihat kondisi tersebut diharapkan nantinya jumlah masyarakat miskin di kabupaten Raja Ampat akan semakin menurun.

Bantuan Langsung Masyarakat

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan terus dilakukan hingga ke pelosok-pelosok daerah di tanah air. Terutama wilayah yang dipindatikan sebagai kantong-kantong kemiskinan. Misalnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, seperti nelayan/petani rumput laut dan petani garam.

Melalui PNPM Mandiri ke-

lantan dan pertikanan, pemerintah melakukan pemberdayaan kepada mereka agar keluar dari belenggu kemiskinan. Caranya dengan memberikan bantuan langsung masyarakat berupa *feedlitz* dan sarana produksi bagi nelayan dan petani rumput laut.

Untuk nelayan dan masyarakat pesisir di Kabupaten Raja Ampat, bantuan yang disalurkan ini merupakan tahap yang kedua. Ada 99 kepala keluarga (KK) yang mendapatkan bantuan tersebut. Seperti dijelaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat, Ir. Becky Rahawarin, MM bahwa program PNPM Mandiri bidang kelautan dan perikanan diberikan khusus untuk masyarakat nelayan dan petani rumput laut berupa tali dan bibit rumput laut.

"Raja Ampat memang cocok untuk pengembangan budi-



Wakil bupati Raja menyerahkan bantuan benih rumput laut sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Raja Ampat.

daya rumput laut, makanya kita memberikan bantuan, agar usaha budidaya rumput laut yang sedang digalakkan di sini semakin berkembang dan kehidupan masyarakat pesisir bisa berubah", ungkap Becky.

Ditambahkan juga, bahwa pengembangan masyarakat pesisir melalui PNPM Mandiri ini sudah memasuki tahap yang ke II. Sedangkan tahap I dilakukan pada tahun 2009 meliputi pengembangan masyarakat di wilayah distrik Salawati Utara, Distrik Selat Sagawin dan Distrik Misool.

Ditempat terpisah, Wakil Bupati Raja Ampat Drs. Inda Ariati juga mengakui bahwa pembudidayaan rumput laut merupakan salah satu alternatif yang paling tepat untuk mendobrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Raja Ampat. Selain cocok dengan kondisi geografis yang terdiri dari lautan, budi-

daya rumput laut tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Dan sistem pemeliharaannya tidak sulit seperti tanaman di daratan.

"Masa panen rumput laut antara 40-45 hari. Sementara hasilnya pun sangat tergantung dari jumlah yang ditanam", jelas Ariati. "Bila budidaya rumput laut ini telah memasyarakat di kabupaten Raja Ampat, maka bukan tidak mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, ekonomi masyarakat akan membaik", tambahnya.

Wakil bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk menerima dan mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan agar tercipta masyarakat yang mandiri dalam bidang ekonomi.

Bantu Nelayan dengan Fasilitas Perikanan

Sektor perikanan dan kelaut-

an merupakan salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Raja Ampat. Selain karena Raja Ampat sebagai kawasan bahari, hampir 90 % masyarakatnya adalah nelayan.

Untuk itu, dalam mendukung aktivitas nelayan, pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan sarana dan fasilitas penangkapan ikan bagi nelayan Raja Ampat.

Bantuan yang diberikan pada saat kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh pimpinan SKPD se kabupaten Raja Ampat itu berupa nylon dan mata kail sebanyak 360 paket. Diberikan kepada kelompok nelayan kampung Urbinasopen sebanyak 110 paket dan nelayan Kampung Warwanai 240 paket. Juga diberikan bantuan cool box 30 unit masing-masing untuk Kampung Gag, Distrik Waigeo



Kurangnya kerja Bupatigat Wani
Bupati Raja Ampat tahun 2010 ke-
sudahnya kalaupun dan lain.

Barat sebanyak 20 unit, Kampung Raswan sebanyak 10 unit.

"Dalam kunjungan ini kita juga berikan bantuan berupa ketinting sebanyak 317 unit bagi nelayan-nelayan Raja Ampat," ujar Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Raja Ampat, Ir. Becky Rahawartin, MM saat ditemui di Kampung Weljim Timur, Distrik Kepulauan Sembilan belum lama ini.

Dikatakan Becky, bantuan ketinting ini diprioritaskan bagi nelayan yang belum menerima bantuan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. "Kalau kita mau kalkulasi hampir kurang lebih 2000-an ketinting telah kita berikan kepada nelayan Raja Ampat. Oleh karena itu saya berharap bantuan tahun ini diprioritaskan bagi nelayan yang belum memiliki ketinting atau sarana penangkapan ikan lainnya," lanjut Becky.

Selain itu, pihaknya mem-berikan bantuan bagi kelompok budidaya rumput laut berupa tali ikat rumput untuk tujuh kampung, antara lain Kampung Reni, Kampung Rytum, Kam-



**Abdul Rahman Wairey, Asisten II
Serda Kabupaten Raja Ampat**

pung MeosBekwan, Yenkawit, Dorekhar, Runi dan Boiseren.

Selain Misoni dan Salawati, saat ini kita juga mengembangkan budidaya rumput laut di Kepulauan Ayau, untuk kita perlu mensupport dengan fasilitas budidaya," papar Becky.

Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program kerja pemerintah kabupaten

Raja Ampat. Ada tiga program lainnya yang berkaitan dengan itu tengah gencar diberantas yaitu masalah ketertinggalan, kebodohan dan keterbelakangan. "Kita harus berantas 4 K (kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan dan keterbelakangan) dari kabupaten Raja Ampat. Jangan biarkan 4 K bercokol di daerah ini", kata Marcus Wamna, Bupati Raja Ampat.

Kalau dilihat dari kondisi yang ada, daerah ini kaya akan sumber daya alam. Baik di lautan maupun di daratan. Mestinya dengan kekayaan alam yang berlimpah itu tingkat kemiskinan masyarakat dapat ditekan serendah mungkin. Namun masalah kemiskinan di kabupaten Raja Ampat cukup kompleks.

Seperti dijelaskan Abdul Rahman Walroy, Asisten II Setda Kabupaten Raja Ampat bahwa kemiskinan di kabupaten Raja Ampat antara lain karena lemahnya keterampilan sumber daya manusia dalam menggali dan mengelola sumber daya alam yang ada. ■

Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan Perbanyak Perpustakaan



Perpustakaan keliling

Oleh: UTOMO HAKIITO

Meningkatkan sumberdaya manusia merupakan salahsatu tujuan pemerintah pusat dan daerah. Caranya dengan meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan sarana perpustakaan pada setiap sekolah.

P"Penambahan beberapa unit fasilitas Perpustakaan ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan para siswa," kata Kepala Dinas Pendidikan Ka-

bupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Isaskar.

Penambah bangunan Perpustakaan itu diperuntukkan bagi sekolah dasar (SD) sebanyak 21 buah, dan untuk SMP sebanyak 6 buah, sehingga total penambahan bangunan Perpustakaan sebanyak 27 buah. Pembangunan perpustakaan ini didapat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun anggaran 2010.

"Kita berupaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini melalui berbagai cara, salah satunya penyediaan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar yaitu perpustakaan," kata Isaskar.

Tanpa adanya perpustakaan sekolah, menurutnya, siswa juga terkendala dalam hal menambah ilmu pengetahuan, lebih-lebih yang berada di desa dengan segala keterbatasan informasi dan

pengetahuan. Melalui Perpustakaan yang ada di sekolah, para siswa diharapkan dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk menambah ilmu dan pengetahuan.

Isaskar menambahkan, pembangunan Perpustakaan ini terus dilakukan di sejumlah sekolah yang belum memiliki gedung perpustakaan, termasuk pada tahun anggaran 2011. Sebab selama ini hanya beberapa sekolah saja yang telah memiliki Perpustakaan. Padahal, perpustakaan menjadi salah satu kebutuhan sekolah yang harus dipenuhi.

Selain bangunan perpustakaan, pemerintah Kabupaten Gunung Mas juga akan menambah buku-buku koleksi perpustakaan agar tidak ketinggalan dengan daerah lainnya.

"Pada tahun 2011 ini kita



Kegiatan pelatihan guru

juga akan menambah gedung perpustakaan di sejumlah daerah, namun dalam realisasi rencana ini kita juga menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.”

Sementara untuk penyediaan buku-buku pelajaran, menurut Isakkar, pihak sekolah dapat membeli menggunakan dana bantuan yang diperuntukkan bagi sekolah. Dengan demikian, pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berjalan, dan mutu pendidikan dapat lebih ditingkatkan dari tahun ke tahun.

22 Calon Guru akan Dikirim ke Jakarta

Kepala Dinas Pendidikan Gunung Mas, juga akan mengirim 22 calon guru ke Yayasan Yohanes Surya Institute di Jakarta. Tujuan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah itu.

22 orang calon guru ini disiapkan sebagai tenaga ahli yang mahir di bidangnya masing-

masing. Setelah menyelesaikan studinya, mereka akan menjadi pengajar bagi tenaga guru yang lain di daerah masing-masing. Dengan demikian, mereka yang akan dikirim benar-benar memiliki daya intelektual yang tinggi.

“Pada tahun ajaran mendatang kita akan mengirimkan 22 calon guru yang akan disekolahkan di Yohanes Institute Jakarta, dan mereka yang akan dikirim merupakan siswa lulusan terbaik dari sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Gunung Mas,” kata Isakkar.

Untuk pembiayaan, pemerintah daerah akan melakukan *sharing* melalui APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Untuk menyelesaikan masa studi 5 tahun, pemerintah akan menyediakan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk 22 orang calon guru.

“Rencana pengiriman sejumlah siswa berprestasi ini dilakukan pemerintah

daerah dalam rangka untuk meningkatkan profesionalitas guru yang ada di daerah. Mengingat, dewasa ini kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas,” tambah Isakkar.

Program ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi guru yang lain, dan mereka harus mampu menjadi tenaga pembimbing bagi guru lainnya.

“Calon guru yang akan kita kirim masing-masing untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, dan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, mereka yang memegang mata pelajaran ini dapat lebih memahami dan menguasai mata pelajaran tersebut. Seiring semakin berkembangnya ilmu dan teknologi, mereka diharapkan mampu menularkan kemampuan yang mereka miliki kepada tenaga guru yang lain,” tandasnya. ■



Objek wisata Batu Mahasur



Pondok

Meniti Untaian Emas di Gunung Mas

GIWA LUTOYO HARJITO

Setiap daerah di Indonesia memiliki pesona alam tersendiri yang mampu menjadi daya tarik orang untuk berkunjung. Begitu pula dengan kabupaten Gunung Mas dengan air terjun nya.

Salah satu pesona alam yang sangat indah di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah air terjun Batu Mahasur yang terletak di bagian hulu. Sekitar 1,5 kilometer dari pusat Kota Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas.

Selain memiliki keindahan air terjun, daerah ini juga ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan tropis. Sehingga pengunjung dapat mengetahui nama dan jenis pepohonan hutan tropis.

Sejuk dan rindang, itulah ke-

san yang akan didapat jika kita mengunjunginya. Apalagi saat pagi dan sore hari adalah waktu tepat buat rekreasi disekitar kawasan air terjun Batu Mahasur. Selain tidak terik, saat pagi atau sore hari kawasan ini terlihat begitu asri.

Sambil mandi pengunjung bisa menyaksikan bagaimana indahnya air terjun mengalir dari ketinggian 20 meter. Keindahan alam itu bisa juga anda dinikmati sambil duduk santai di beberapa gazebo yang dibangun di bawah pepohonan yang terawat rapi. Tak heran, lokasi Batu Mahasur kini menjadi salah satu objek wisata andalan Kabupaten Gunung Mas.

Kawasan air terjun Batu Mahasur sudah begitu terkenal sampai ke Kota Palangka Raya, Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan nama air terjun ini diabadikan menjadi sebuah nama jalan di kawasan kampus Universitas Palangka Raya.

Putrisa, pelajar putri yang sedang berkunjung, mengakui keindahan air terjun Batu Mahasur memang sangat menga-

gumkan.

"Lokasinya cocok menjadi tempat rekreasi keluarga dan kawula muda yang ingin bersantai ria. Selain menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat belajar tentang berbagai nama pohon kayu yang ada di hutan Kalimantan pada umumnya," ungkap Putrisa.

"Karena, semua pohon kayu di daerah Batu Mahasur telah diberi nama oleh pengelola dan pemerintah daerah. Bagi masyarakat atau pengunjung yang kurang memahami nama kayu atau pohon, maka praktis dapat belajar di sini," tambahnya.

"Selain itu tempat ini bisa menjadi objek wisata pendidikan bagi kami yang kurang memahami nama pohon kayu. Soalnya, tumbuhan yang ada di daerah wisata itu lengkap dengan nama latin maupun Indonesia, sesuai jenis kayu," kata gadis itu.

Yokdie, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Gumas, menilai potensi alam masih bisa dikembangkan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.



Upacara "Tiwah" atau Magah Salumpuk Liau Mati adalah upacara adat upacara sakral terbesar untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat yang dituju.

Bagi para pengunjung yang masuk ke objek wisata Batu Mahasur dikenakan biaya Rp2.500/orang. Dana ini diharapkan mampu mendorong pendapatan asli daerah (PAD).

"Kita berharap melalui kerja sama tersebut, paling tidak,

mampu melakukan perawatan lokasi yang selama ini terkesan kurang mendapat perhatian," ujar Yodikie.

Budaya

Selain wisata alam, Kabupaten Gunung Mas juga memiliki potensi wisata budaya yang tak kalah menarik. Kegiatan masyarakat Gunung Mas mulai dari kehidupan sehari-hari sampai acara upacara adat tradisional bisa menjadi daya tarik wisata. Misalnya upacara "Tiwah" atau Magah Salumpuk Liau Mati adalah upacara adat upacara sakral terbesar untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat yang dituju.

Upacara ini, haruslah melalui perantara seorang Rawing Tempun Telun, Raja Dohong

Bulau atau Mantir Mama Luhing Bungai Raja Malawung Bulau, yang bertempat tinggal di langit ketiga. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Rawing Tempun Telun dibantu oleh Telun dan Hamparung dengan melalui bermacam-macam rintangan.

Kendaraan yang digunakan oleh Rawing Tempun Telun mengantarkan liau ke Lewu Liau ialah Banama Balai Rabia, Bulau Pulau Tandih Nyahu Sali Rabia, Manuk Ambun, Perjalanannya menuju Lewu Liau melewati empat puluh lapisan embun, melalui sungai-sungai, gunung-gunung, lasik, laut, telaga, jembatan-jembatan yang mungkin saja apabila pelaksanaan tidak sempurna, Salumpuk liau yang diantar menuju alam baka bisa tersesat. ■

Rumah Betang Temanggung Singa Kenting



Rumah Betang Temanggung Singa Kenting.

Rumah Betang "Temanggung Singa Kenting" ini merupakan Betang peninggalan Suku Dayak Ot Danum yang merupakan asli pedalaman di Hulu Sungai Kahayan. Betang

tersebut berada di Desa Tumbang Korik Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas dan diperkirakan dibangun pada awal abad ke-19. Kawasan Betang ini menempati area seluas 1 hektar dengan jumlah lereng mencapai 5% hingga 20%.

Untuk mencapai Betang Toyoi ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat melalui jalan darat, dengan jarak tempuh ± 93,27 km dari Kota Kuala Kurun s/d Tumbang Miri. Setelah itu pengunjung bisa melanjutkan dengan kapal feri penyebrangan melewati sungai kahayan menuju Desa Tumbang Korik.

Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang yang

tersedia di lokasi Betang masih terbatas. Sejumlah rumah penduduk dan betang itu sendiri terdapat masih asli dan berusia ratusan tahun. Rumah betang itu kini masih dihuni oleh keluarga ahli waris yang menyimpan sebuah makam kuno. Di tengah Betang terdapat sebuah ruang besar yang konon merupakan pemberian orang gale pada masa pembangunannya.

Daya tarik betang terletak pada kondisi betang yang masih asli dan kehidupan Suku Dayak Ot Danum sebagaimana jaman dahulu. Dinding dan atap bangunan yang terbuat dari kayu dan kulit kayu masih alami dan masih terjaga kondisinya. ■



Pembangunan untuk Rakyat

oleh B. WILSON LUKU

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidak cuma dari satu sisi, namun harus serentak dari berbagai sektor. Misalnya pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur juga SDM.

SDM dan lainnya.

Hat itulah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, yang baru dimekarkan pada tahun 2003 lalu. Sebagai daerah baru dengan kondisi terbelakang dari kabupaten lainnya, menjadikan kabupaten itu harus bekerja keras membangun daerahnya. Untuk itu langkah pertama yang dilakukan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat di sektor kesehatan.

Sejak tahun 2006, Pemerintah Kabupaten SBT telah memprioritaskan upaya peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Langkah yang dilakukan adalah mendirikan satu unit RSUD tipe C, 6 unit Puskesmas rawat inap, 7 Puskesmas rawat jalan, serta 46 unit Puskesmas pembantu.

Disadari pelayanan kesehatan yang memuaskan sangat

ditunjang alat-alat kesehatan yang memadai, untuk itu secara bertahap Pemda terus memprogramkan pengadaan alat-alat kesehatan sesuai kemampuan anggaran.

Menyangkut tenaga medis yang sebelumnya minim, kini telah tersedia 29 dokter dan 191 tenaga paramedis. Jumlah tersebut menyebabkan rasio tenaga medis dan jumlah penduduk menjadi agak kecil yakni 1 berbanding 1.382 dan rasio paramedis 1 berbanding 44.240. Rasio ini disadari masih kurang memuaskan. Namun bila dibandingkan dengan kondisi sebelum SBT dimekarkan tentunya realitasnya kini sangat jauh lebih baik.

Satya Lencana Pembangunan

Dalam perjalanan Kabupaten SBT ke depan, Abdullah Vanath,

Dalam membangun sektor kesehatan misalnya menjadi sangat penting karena dapat menunjang pembangunan di sektor lainnya. Dengan meningkatnya taraf kesehatan masyarakat diharapkan dapat berimbas pada peningkatan sektor lainnya seperti meningkatnya kualitas pendidikan,



Transportasi udara mendarat di Kabupaten Seram Bagian Timur

selaku bupati itu merasa optimis bahwa prestasi di segala bidang akan terus mewarnai laju pertumbuhan pembangunan daerahnya. Abdullah Vanath mengungkapkan perasaan optimismenya ini usai menerima Satya Lencana Pembangunan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang diserahkan Mendagri Mardiyanto usai peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-64.

Kini pun, daerah berjuduk "kabupaten matahari terbit" ini menjadi incaran investor, baik investor dalam maupun luar negeri. Ini semua karena potensi daerahnya kaya akan sumber daya alam. Mulai dari pertanian, perkebunan, hasil-hasil hutan, dan pertambangan, apalagi hasil lautnya, semuanya masih menjanjikan.

Untuk bisa sampai ke SBT kita tidak perlu terlalu repot seperti dulu lagi. Sebab, Kabupaten SBT telah memiliki jaringan penerbangan dari Jakarta menuju Ambon. Kemudian dengan



Abdullah Vanath
Bupati Seram Bagian Timur

sarana angkutan laut kita dapat langsung menuju ke Kabupaten SBT. Waktu yang diperlukan, melalui perjalanan dari Kota Ambon, hanya dibutuhkan kurang lebih 12 jam untuk bisa sampai ke Kota Bula ibukota SBT (satu jam dari Bandar Udara Pattimura menuju Pelabuhan Hanimua, Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah).

Selanjutnya dari Hanimua ke pelabuhan Waypirt di Seram Bagian Barat ditempuh selama 2 jam. Kemudian dari perbatasan SBT hingga ke kota Bula, ibukota SBT, membutuhkan waktu

hingga 8 jam melalui jalur darat. Jadi kalau perjalanan dari Jakarta ke kabupaten SBT dapat ditempuh waktu kurang lebih 15 jam perjalanan.

Kabupaten SBT, Provinsi Maluku yang dimekarkan menjadi daerah otonomi sejak 2003 ini merupakan salah satu daerah yang gigit membangun. Paling tidak ada tiga parameter yang bisa kita lihat dari upaya pembangunan daerah

ini. *Pertama*, kemampuannya dalam meningkatkan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur. *Kedua*, peningkatan layanan publik, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan administrasi kependudukan. *Ketiga*, peningkatan performa politik, sinkronisasi antar lembaga politik demi kelancaran roda pemerintahan.

Sebagai daerah baru, SBT terus membangun untuk mengejar berbagai keteringgalan dari daerah lain, terutama di kawasan Indonesia Timur. Di bawah pemerintahan Abdullah

INDIKATOR PENENTU MASIH TERDAPATNYA PERMASALAHAN PENDUDUK YANG MELAKUKAN PENGobatan SENDIRI DI MALUKU TAHUN 2008

No	Kabupaten/Kota	Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	Rasio Tenaga Kesehatan Lain per 100.000 Penduduk
1	MALUKU TENGGARA BARAT	7,03	0,99	99,99	157,08
2	MALUKU TENGGARA	25,40	4,08	157,35	155,01
3	MALUKU TENGAH	15,03	2,81	82,11	93,67
4	BURU	7,48	1,25	56,28	66,15
5	KEPULADAN ARU	15,12	8,54	160,06	207,86
6	SERAM BAGIAN BARAT	12,65	3,18	87,96	85,37
7	SERAM BAGIAN TIMUR	14,41	2,06	80,15	76,23
8	AMBON	21,98	3,24	70,65	79,91

Sumber: Data Statistik Kesehatan

INDIKATOR-INDIKATOR YANG MENGGAMBARAKAN AKSES PENDUDUK TERHADAP FASILITAS KESEHATAN DI MALUKU TAHUN 2008

No	Kabupaten/Kota	Jarak Rata-rata Menuju Rumah Sakit Terdekat (Km)	Jarak Rata-rata Menuju Rumah Sakit Bersalin Terdekat (Km)	Jarak Rata-rata Menuju Puskesmas Terdekat (Km)	Jarak Rata-rata Menuju Toko Obat/Apotik Terdekat (Km)
1	MALUKU TENGGARA BARAT	88,84	90,67	94,34	80,61
2	MALUKU TENGGARA	27,56	97,63	16,20	17,39
3	MALUKU TENGAH	55,28	67,45	80,36	15,44
4	BURU	73,99	92,68	56,52	23,30
5	KEPULADAN ARU	74,32	74,28	88,48	17,86
6	SERAM BAGIAN BARAT	73,82	82,96	81,83	26,08
7	SERAM BAGIAN TIMUR	67,47	95,03	93,15	20,67
8	AMBON	5,96	10,12	8,12	9,95

Sumber: Statistik Kesehatan

Vanathi. SBT yang dulu terisolir perlahan menjadi daerah terbuka. Pembangunan perekonomian masyarakat dan infrastruktur daerah terus digenjot. Hasilnya kini sudah mulai dirasakan masyarakat setempat. Pembangunan lain sebagai upaya mengejar ketertinggalan adalah pembangunan infrastruktur jalan Trans Seram. Jalan raya ini merupakan penghubung antarpulau dan daerah lain di kawasan kepulauan Seram.

Tidak ketinggalan juga pembangunan sarana jalan antar kecamatan sebagai upaya membuka keterisolasian. Ada 6 kecamatan yang saat ini membawahi sekitar 84 desa, yang terdiri dari 26 desa swadaya, 53 desa swakarya, dan 5 desa swasembada. Semua kecamatan dan desa itu, saat ini sudah dapat saling berhubungan melalui jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat.

Letak geografis

Secara geografis SBT dibatasi oleh Laut Seram di sebelah Utara, Laut Banda di sebelah Selatan, Laut Arafura di sebelah Timur, dan Kabupaten Maluku Tengah di sebelah Barat. Luas wilayah SBT kurang lebih 20.656.894 km² yang terdiri dari luas laut 14.877.771 km² dan luas daratan 5.779.123 km², dengan jumlah pulau sebanyak 5 pulau dan 29 sungai.

Iklim yang terdapat di kabupaten SBT adalah iklim laut tropis dan iklim musim. Terjadi iklim tersebut dikarenakan kabupaten SBT dikelilingi oleh laut yang luas, maka iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh laut yang berlangsung seirama dengan musim yang ada.

Penduduk Kabupaten SBT berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 berjumlah 99.065 jiwa yang terdiri dari

laki-laki 50.576 dan perempuan 48.489 jiwa. Untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia di masa depan, maka pemerintah kabupaten SBT telah membangun sarana pendidikan dasar. Seperti pembangunan 9 gedung TK yang menampung sekitar 335 murid dengan 31 staf pendidik. Dan pembangunan 137 gedung sekolah dasar yang menampung sebanyak 18.424 siswa dengan 1.079 guru.

Khusus bidang pertanian dan perkebunan, Kabupaten SBT telah memproduksi tanaman pangan dengan memiliki produksi paling besar yakni ubi kayu diikuti ubi jalar, jagung, padi sawah, kacang kedelai, kacang

tanah dan kacang hijau. Kemudian di bidang perkebunan daerah ini tercatat telah membudidayakan kelapa, cengkeh, pala, coklat kopi, jambu mete.

Namun untuk komoditi rempah-rempah seperti pala dan cengkeh masih tetap berada pada urutan pertama yang diikuti masyarakat setempat. Tercatat ada 20.769 rumah tangga yang berusaha di sektor perkebunan rempah-rempah ini. Dengan luas areal perkebunan seluruhnya 5.890,5 ha.

Di bidang industri, dalam usaha pemerataan struktur ekonomi dan pengaruhnya terhadap sektor pertanian, maka pembangunan sektor industri meng-



Pemandangan Kota Bula dari atas

113-01404

alami penyempurnaan kelompok klasifikasi dan pengembangan usaha di kecamatan.

Tahun 2009 dari 6 kecamatan yang ada memiliki kegiatan industri dengan jumlah unit usaha sebanyak 49 buah dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 180 orang. Daerah ini pun telah berhasil membuka keterisolasian, salah satunya dengan membangun pembangkit listrik.

Dengan mengandalkan program listrik masuk desa, maka polistrifikasi telah menjangkau sampai ke pedesaan walaupun penyebarannya belum menyeluruh. Tahun 2009 berhasil dibangun unit/lokasi PLN sebanyak 7 sub ranting. Jumlah produksi terbesar di sub ranting kota Bula sebanyak 3.394.053 KWH dengan KWH terjual sebanyak 1.969.964 dengan nilai KWH terjual berjumlah Rp. 1.234.642.595.-

Potensi daerah lainnya yang sedang digenot pemerintah Kabupaten SBT untuk bisa menambah PAD yakni membidik produk yang bisa diekspor.

Produk-produk lokal yang diharapkan bisa masuk pasar internasional itu, di antaranya hasil hutan (kayu berkualitas tinggi), hasil perkebunan (pala, cengkeh) serta hasil laut (sirip hiu, lobster, rumput laut, dll). Saat ini, produk-produk itu masih dikelola pengusaha-pengusaha kecil (putra daerah), sehingga timbul kesulitan untuk dilakukan pendataan.

Sementara untuk pembangunan infrastruktur yang sekarang terus diupayakan adalah sarana transportasi. Hal ini dilakukan karena pemerintah menyadari kondisi geografis kabupaten SBT yang masih memerlukan sarana transportasi baik darat, laut dan udara. Maka tidaklah mengherankan apabila masalah transportasi juga menjadi prioritas utama dari sasaran pembangunan wilayah ini.

Hubungan antar pulau di daerah ini lebih banyak dihubungkan dengan angkutan laut. Namun tidak semua daerah dapat setiap saat dihubungkan

oleh transportasi laut itu, mengingat kondisi alam dan cuaca yang seringkali menjadi penghambat utama.

"Sistem transportasi jalan raya tidak dominan dalam melayani kebutuhan transportasi di daerah ini, tetapi memegang peranan penting khususnya untuk melayani arus bolak-balik penduduk dalam suatu pulau tertentu. Ini merupakan alternatif transportasi yang baik pada musim tertentu, pada saat transportasi laut tidak dapat digunakan," jelas Abdullah Vanath.

Menurutnya, panjang jalan di Kabupaten SBT sepanjang 447 (2009), namun yang diaspal panjangnya mencapai 100,29 km. Sisanya, masih terdiri dari pengerasan baru dan pengurusan pembuatan jalan. Potensi daerah lain yang sedang dikembangkan adalah peningkatan fasilitas objek wisata daerah. Tahun 2008, SBT memiliki objek wisata sebanyak 33 lokasi yang tersebar di 6 kecamatan. ■



Pelabuhan Manokwari. Salah satu poros perekonomian Provinsi Papua Barat

Kekayaan Alam Dorong Kesejahteraan Rakyat

ONNY UTOMO HARJITO

Kekayaan alam Papua Barat yang berlimpah itu, diharapkan mampu menjadi pendorong bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pencapaian kinerja bidang peningkatan ekonomi rakyat di Papua Barat dengan ibukotanya Manokwari cukup mengesankan. Hal ini dapat diindikasikan dengan gambaran struktur ekonomi Papua Barat yang bertumpu pada sektor pertanian sebagai sektor basis yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tak kurang dari 27,16 persen dimana sumbangan ini diperoleh dari sub sektor kehutanan dan perkebunan, sub sektor perikanan, sub sektor tanaman pangan

dan holtikultura.

Sejalan dengan itu maka dalam pembentukan nilai tambah, andil sub sektor kehutanan dan perkebunan lebih terfokus pada upaya peningkatan komoditas perkebunan.

Dengan luas total perkebunan rakyat 43.619 Ha dapat menghasilkan total produksi sebesar 28.312 ton dan Produksi Hasil Hutan Kayu Bulat, Kayu Gergajian, Kayu Hitam, Rotan, Damar, Kayu Bakar, Kamiri dan Kayu Manis.

Namun pemanfaatan hasil hutan tersebut masih sangat

KOMODITAS HASIL PERKEBUNAN
PAPUA BARAT

Komoditi	Luas area perkebunan	Hasil
Kelapa	10.942 Ha	5.965 ton
Kopi Sawit	18.340 Ha	17.326 ton
Kopi	708 Ha	218 ton
Orangutan	798 Ha	60 ton
Coklat	8.461 Ha	2.957 ton
Pada	5.311 Ha	1.249 ton
Jambu mete	301 Ha	2 ton

Sumber: BPS, 2009

LUAS PANEN, PRODUKSI,
DAN HASIL PER HEKTAR PADI SAWAH
MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2008

Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Hasil per Hektar (Kg/Ha)
Tarakan	85	299	35,06
Kaimana	-	-	-
Teluk Wondama	51	180	35,29
Teluk Bintuni	165	1.293	35,42
Manokwari	6.507	22.900	35,22
Sorong Selatan	-	-	-
Sorong	1.853	10.784	35,32
Kepi Amput	207	1.041	35,32

Sumber: BPS, 2009

terbatas dinikmati masyarakat setempat.

Hutan di kabupaten Manokwari menjadi penyumbang terbesar kegiatan ekonomi. Tahun 2001 nilainya mencapai Rp. 190 miliar. Namun untuk menjaga kelestarian hutan, maka hutan tidak bisa dieksplorasi lagi tanpa izin yang ketat. Potensi hutan yang menghasilkan kayu, non kayu, dan anggrek hutan ini

didukung kawasan 63,22 % dari luas wilayah kabupaten. 75% wilayah hutan di Manokwari merupakan hutan lindung atau cagar alam.

Hutan produksi menghasilkan 79 jenis kayu komersial seperti merbau, matoa, dan meranti yang merupakan andalan ekspor. Setelah hasil hutan, tanaman bahan pangan menjadi penghasil kegiatan ekonomi berikut.

Kegiatan ini tahun 2011 menyumbang sebesar Rp 111,23 miliar atau sebesar 12,6%. Tidak kurang dari 56,7% tenaga kerja terisera dalam lapangan usaha ini. Tidak hanya umbi-umbian saja yang menjadi andalan, tetapi padi, buah-buahan, dan sayuran juga telah berkembang dengan baik.

Didukung dengan luas lahan sawah beririgasi 2.275 hektar, Kabupaten Manokwari menjadi penyumbang padi terbesar kedua di Provinsi Papua setelah kabupaten Merauke. Produksinya tahun 2002 mencapai 10.232 ton dengan rata-rata produksi 2,43 ton per hektar. Sentra produksi padi berada di Kecamatan Masni yang merupakan daerah transigrasi.

Meski kabupaten berpenduduk 195.166 jiwa ini merupakan produsen beras, untuk memenuhi konsumsi penduduknya masih perlu didatangkan beras dari Jawa Timur dan Sulawesi selatan. Padahal beras lokal yang dikenal dengan beras Oransburi, kualitasnya tidak kalah dengan beras produksi daerah lain. Harga beras Oransburi yang perkilogramnya mencapai Rp 5.000 mungkin menjadi alasan mengapa mendatangkan beras dari luar daerah yang harganya sekitar Rp 3.500.

Palawija menjadi bahan andalan tahun 2002 termasuk jenis umbi-umbian, seperti ubi kayu

(24.453 ton), ubi jalar (15.274 ton), dan keladi (3.462 ton). Tidak hanya padi dan palawija, buah-buahan pun produksinya bagus. Hampir semua jenis buah bisa berkembang di Manokwari, di antaranya alpukat, duku, durian, jambu, mangga, dan nangka. Bibit buah tersebut didatangkan dari provinsi lain, dengan kualitas yang tidak kalah dengan produksi dari provinsi lain. Jumlah terbesar adalah pisang, tahun 2001 jumlahnya mencapai 24.698 ton. Komoditas ini banyak dikonsumsi oleh penduduk lokal sebagai makanan sehari-hari.

Selain produksi dari hutan dan tanaman pangan, Manokwari juga kaya akan hasil perikanan. Letaknya yang berbatasan dengan laut, Teluk Cendrawasih dan Bintuni, menjadi ladang yang subur bagi kehidupan ikan laut.

Pada tahun 2001, perikanan mampu menyumbang Rp 106, 61 miliar atau 12% dari total kegiatan ekonomi, sebagian besar dari perikanan laut yang mencapai 8.238,57 ton. Udang dan tuna/cakalang merupakan komoditas andalan yang bernilai komersial tinggi, bahkan menjadi komoditas ekspor unggulan.

Potensi udang dan cakalang ini dilirik juga oleh investor dari luar kabupaten Manokwari. Beberapa pihak mendirikan tempat pengolahan ikan dan udang yang berorientasi ekspor di Kecamatan Manokwari dan Babo.

Tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, pemerintah daerah Manokwari juga mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. Dengan program ini diharapkan masyarakat dapat memberikan nilai tambah terhadap hasil alam tersebut.

Upaya untuk meningkatkan daya saing investasi lokal dalam pembentukan nilai tambah da-



Pengrajin tas noken, merupakan cenderamata khas daerah Papua Barat. Produk ini dapat menunjang pariwisata dan UKM setempat.

lam PDRB maka diperlukan penguatan kapasitas institusi lembaga ekonomi mikro yang meliputi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah dilaksanakan melalui pembentukan Usaha Koperasi pada skala kecil maupun menengah dengan serapan dana kredit usaha sebesar Rp Tiga milyar rupiah sebagai stimulan dari APBD Pro. Barat tahun 2008.

Penerimaan daerah

Keberhasilan dan kelancaran roda pemerintahan suatu daerah, selain ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal, juga dipengaruhi sumber dana yang memadai yaitu bersumber dari penerimaan daerah. Hasil penerimaan daerah selanjutnya direalisasikan untuk berbagai kegiatan baik yang menyangkut kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan.

Pada tahun anggaran 2007 penerimaan daerah otonom Provinsi Papua Barat yang bersumber dari penerimaan daerah setiap kabupaten / kota. Jumlah penerimaan daerah yang tercatat sebesar Rp 3.095.036.579.315,- atau mengalami kenaikan sebesar 341,23 % dibandingkan tahun 2006. ■

PROGRAM PEREKONOMIAN RAKYAT UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN

Sasaran program bidang perekonomian rakyat diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan fokus pada:

- (1) Revitalisasi sektor pertanian dan perikanan sebagai basis karena merupakan mata pencaharian utama penduduk di Papua dengan prioritas, peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam upaya mempertahankan stok pangan lokal, selain itu juga upaya peningkatan usaha peternakan rakyat.
- (2) Pengembangan perkebunan pola PIR dan pengembangan rakyat dengan kemitraan unggulan berupa kelapa, vanila, kakao, kopi dan tanaman buah-buahan.
- (3) Pengembangan Potensi Perikanan dan Kelautan.
- (4) Pengembangan usaha pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu.
- (5) Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi berupa pembinaan dan penyediaan modal usaha dan fasilitas kredit dengan anggarannya yang rendah.

Jadikan Papua Sentra Ekonomi Indonesia Timur

DIRKUTUMPA HARITO

Indonesia membutuhkan daerah yang memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Idealnya, setiap daerah memiliki sentra ekonomi yang menunjang ekonomi rakyat dan mampu menurunkan angka kemiskinan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, dalam empat tahun mendatang Provinsi Papua dan Papua Barat akan dibangun proyek ekonomi khusus. Dua kawasan ekonomi khusus ini akan dibangun di Papua dan satu di Papua Barat.

"Tujuannya agar lebih banyak lagi aktivitas perdagangan dan jasa yang dibangun di Papua," kata Presiden SBY saat berkunjung ke Bandara Rendani, Papua Barat.

Presiden SBY menjelaskan, dengan dibangunnya kawasan ekonomi khusus itu, rakyat Papua dan Papua Barat tidak perlu mendatangkan lagi kebutuhan dari luar. "Kita ingin sebagian kebutuhan rakyat bisa diproduksi di dua provinsi ini," ujar Presi-



Abraham O. Aturury,
Gubernur Papua Barat

den. Kawasan ekonomi khusus ini nantinya akan didukung oleh pembangkit listrik tenaga hidro.

Menurut Presiden SBY, di Papua Barat, diharapkan dapat dibangun seperti pabrik semen, peternakan sapi, dan perkebunan kedelai. "Papua Barat diharapkan bisa menyumbang kedelai dan daging sapi," jelas Presiden SBY.

Hal ini juga disambut baik oleh Gubernur Papua Barat, Abraham O. Aturury yang segera merealisasikan beberapa daerah yang direncanakan sebagai sentra peternakan sapi.

"Kami siap untuk menjawab hal tersebut karena hal ini juga sesuai dengan tujuan pemerintah daerah," ujar Gubernur melalui Marthen K. Suruan, Kepala Humas Provinsi Papua Barat.

Untuk kebutuhan energi, Papua Barat juga akan membangun pembangkit listrik dalam menopang percepatan pemba-

ngunan daerahnya.

"Selain itu kebutuhan *power engineering* untuk mempercepat pembangunan sebagai pendukung. Seperti eskalator pada gedung bertingkat yang di masa datang akan dibangun lebih tinggi lagi. Hal ini diperlukan agar Papua mampu bersaing dengan daerah lain," tambah Marthen K. Suruan.

Tidak hanya sumber daya alamnya saja seperti Nikel, batubara, gas alam yang dieksplorasi, pemerintah Papua Barat telah berupaya juga menggal berbagai potensi sumber daya manusia.

"Dibantu dengan petugas penyuluh pertanian, masyarakat terus berkontribusi pada kemajuan pertanian di Papua Barat, mereka memberikan contoh bercocok tanam yang baik pada penduduk Papua Barat," ujar Marthen K. Suruan.

Di bidang pariwisata, Papua Barat sangat kaya dengan keanekaragaman dan keindahan alamnya. Terbukti banyak wisatawan yang datang dan kembali dengan meninggalkan kesan yang baik terhadap Papua Barat. Kendati demikian, promosi dan publikasi masih sangat diperlukan untuk menginformasikan keindahan alam dan kebudayaan Papua Barat pada dunia luar.

"Ada beberapa daerah yang cukup indah di Papua barat seperti Raja Ampat. Ke depan, Kaimana juga terus dikembangkan," ujar Marthen K. Suruan. ■

Eksplorasi

Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat

Oleh: UTOYO HARJITO

Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan.

Sumber daya alam di suatu daerah diharapkan bisa menjadi pendorong bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah itu sendiri. Dengan demikian, angka kemiskinan bisa menurun.

Dengan ditemukannya sumber daya alam (di perut bumi) kabupaten Aru yang berupa mineral, Pihak pemerintah daerah telah mengundang pihak pusat dan swasta untuk membantu mengeksplorasinya.

"Bila pengeboran eksplorasi ternyata kandungannya bernilai ekonomis, Pemkab Kepulauan Aru akan mendapatkan bagi hasil yang besar untuk mendorong percepatan pembangunan," ujar kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Bram Tomaso, Senin (13/12).

Bram memastikan dana bagi hasil tersebut berasal dari kontribusi pihak swasta. Adapun izin didapat dari



Eksplorasi sumber daya alam diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru.

Kementerian ESDM untuk pengeboran eksplorasi blok Arafura Sail yang ada di Kecamatan Aru Selatan Utara.

"Saya diberitahu bahwa Pemkab Kepulauan Aru untuk berbagai pengurusan tojenjang eksplorasi berdasarkan izin dari Kementerian ESDM telah menerima dana bagi hasil sebesar Rp32 miliar lebih," ujarnya.

"Pengeboran dilakukan pihaknya bersama tim PT. Conoco Phillips dan Badan Pengelola (BP) Migas. Pihak-pihak itu bersosialisasi di Dobo,"

jelasnya.

"Sosialisasi diberikan kepada DPRD dan Satuan Perangkat Kerja daerah (SKPD) Kepulauan Aru serta tokoh masyarakat, agar terbangun kesepahaman untuk kegiatan investasi yang membutuhkan anggaran besar," kata Bram.

"PT. Conoco Phillips dan Badan Pengelola (BP) Migas telah memasang peralatan pengeboran. Diperkirakan akhir Desember pengeboran akan dimulai di Blok Amborit 6 di lepas pantai Kepulauan Aru, Maluku," tambahnya. ■

Bangun Komitmen untuk Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan

CHEN, UTOYO, HARJITO

Kawasan perbatasan adalah beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian



Chenopodium baeri Kawaguchi et al.

Perhatian khusus itu berupa percepatan pembangunan secara terpadu untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya. Tidak hanya itu, percepatan pembangunan daerah harus juga didasari dengan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk itu pemerintah Aru akan menggelar rapat koordinasi (rakor) percepatan pembangunan daerah tertinggal dan daerah perbatasan pada akhir Maret.

"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru akan melakukan rapat koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal dan daerah perbatasan," Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Arens Unipalita.

Dikatakan, kegiatan Raker tersebut sekaligus dilakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat letak pulau terluar, tertinggal dan terdepan. Hal ini karena Kabupaten Kepulauan Aru merupakan beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia.

Tujuan Ralcor itu untuk membangun komitmen bersama dalam rangka percepatan pembangunan daerah perbatasan secara terpadu, komprehensif, dan terintegrasi. Ralcor (ni) juga akan menyamakan visi dan persepsi antara pusat dan daerah dalam menyinergikan program.

"Hasil raker akan dituangkan dalam perencanaan pembangunan pemerintah pusat yang akan dikembangkan melalui bantuan langsung maupun bantuan yang

sifatnya memberdayakan masyarakat di daerah/pulau perbatasan," kata Arens Uniplaita

"Berdasarkan hasil rakor di pusat, ditetapkan tiga kabupaten pada dua provinsi yang akan dilakikan rakor di daerah pemerintahannya, dengan tujuan untuk membahas proses percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pulau terluar masing-masing, Kabupaten Alor Kabupaten Belu (NTT) dan Kabupaten Kepulauan Aru (Provinsi Maluku)," tambah Arens Uniplajta.

Untuk Kabupaten Kepulauan Aru, terdapat delapan pulau terluar pada empat kecamatan, yaitu Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tenjoh Selatan dan Kecamatan Aru Selatan Timur yang tersebar pada kawasan utara dan kawasan selatan Kepulauan Aru, di antaranya Pulau Emo, Pulau Karang dan Pulau Batu Gwang.

"Untuk Pulau Eno akan dilakukan sebagai pulau cagar alam, sementara Pulau Karang akan dijadikan sebagai pulau konservasi laut" ungkap Arens.

Hal ini juga menjadi perhatian Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Helmy Faushal Zaini. Helmy direncanakan mengunjungi Kabupaten bersejarah Bumi Jangaria ini pada 29 Maret hingga 1 Mei 2011.

"Kehadiran Menteri PDT merupakan suatu upaya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah, terutama daerah tertinggal dan pulau terluar," jelas Arens. ■

Kemilau Mutiara Dobo Bantu Tanggulangi Kemiskinan

DAK: UTOMO HARATO

Kepulauan Aru yang terdiri dari 187 pulau, memiliki potensi alam yang cukup besar. Banyak orang menilai laut Kepulauan Aru adalah salah satu yang terluas di nusantara.



Mutiara Dobo



Dobo, ibukota kabupaten Aru tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, namun juga menjadi kota perdagangan. Kepulauan Aru, tak pernah sepi akan pedagang mutiara atau produk lainnya. Ramainya perniagaan di Dobo adalah efek tak langsung dari kejayaan mutiara yang dikenal sebagai "Dobo Pearl" atau mutiara Dobo.

Mutiara telah meningkatkan pendapatan penduduk dan mengubah Dobo menjadi pasar yang potensial. Para pedagang yang umumnya adalah etnis China merupakan pendatang dari Makasar dan pulau Jawa yang membawa barang dagangannya dengan kapal langsung dari Surabaya ke Dobo. Berbagai muatan, mulai dari sembako hingga barang elektronik, di bongkar dari kapal lalu dijual dengan harga yang lebih murah ketimbang kota-kota lain di sekitar Dobo.

Mutiara Dobo umumnya diproduksi dengan campur tangan

manusia yang dibudidayakan di Kecamatan Pulau-pulau Aru dan Aru Tengah. Setiap siput mutiara (*Pinctada maxima*) akan disuntik dengan benda asing atau nucleus dan ditempatkan kembali di dasar laut. Satu hingga satu setengah tahun kemudian, siput akan diangkat dan dibuka untuk diambil benda asing yang anggun di dalamnya, tak lain adalah mutiara.

Pada tahun 1990, jumlah usaha budi daya mutiara Dobo yang berwarna keemasan, putih, krem ataupun keperakan jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2000-an. Namun, serangan virus yang menyebabkan lingunya terputus telah menghancurkan banyak usaha budi daya ini. Sekarang tinggal empat perusahaan besar yang mampu memproduksi. Kapasitas produksi perusahaan yang berskala besar berkisar 2.000 butir mutiara dan produksi perusahaan kecil berkisar 100 sampai 200 butir. Perusahaan-perusahaan ini kebanyakan menjualnya ke Surabaya dan Makasar, bahkan mengekspor ke Jepang.

Mutiara budi daya berbeda dengan mutiara yang dihasilkan secara alami, tanpa campur tangan manusia. Bentuk mutiara hasil budi daya lebih sempurna, atau lebih bulat. Harga satu butir mutiara yang berkualitas unggul mencapai Rp 1 juta atau yang kualitas biasa hanya Rp 300.000 per butir.

Sektor perikanan juga sangat membantu perekonomian kabupaten Aru. Ketika belum berdiri sendiri, tangkapan ikan dari Kepulauan Aru cukup banyak membantu produksi ikan Kabupaten Maluku Tenggara. Tercatat sekitar 30% produk ikan dari Maluku Tenggara berasal dari Kepulauan Aru. Padahal Maluku Tenggara sangat bergantung pada sektor perikanan, tak kurang dari 32,13% kegiatan ekonomi dari sektor ini. Namun keterbatasan pemasaran dan penyimpanan merendahkan posisi nelayan dalam menjual hasil tangkapan di laut. Hanya ada dua penyimpanan ikan berpendingin di Dobo dan Benjina.

Komoditas lainnya adalah rumput laut, komoditi ini menjadi andalan usaha

budidaya perikanan, karena pengerjaannya mudah dan memiliki nilai ekonomis tinggi serta memiliki pangsa pasar yang kompetitif, merambah pasar pada level pasar lokal, domestik, serta dunia.

Hal ini diakibatkan permintaan rumput laut yang besar bagi industri makanan suplemen, kosmetik dan obat-obatan. Luas lahan dan ruang di wilayah Aru yang masih tersedia dalam jumlah yang besar, merupakan peluang yang pantas dan layak untuk dimanfaatkan.

Pendapatan per kapita masyarakat menunjukkan angka peningkatan yang signifikan sejak mulai beralih pada usaha budidaya rumput laut. Harga rumput laut di Kepulauan Aru saat ini berfluktuasi antara 10.000/kg - 20.000/kg, dengan masa kerja tanam hanya mencapai 30 hari, sudah bisa dinikmati hasilnya yang bernilai puluhan juta Rupiah.

Ada juga teripang dan sirip ikan hiu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Pasar yang dituju adalah sama halnya dengan berbagai komoditi perikanan lainnya seperti mutiara dan rumput laut. Harga jual teripang di Kepulauan Aru mencapai 1.000.000 - 1.500.000/kg. Apalagi teripang dapat dihididayakan dalam tambak.

Komoditas udang juga tak



Teripang

mau kalah dengan potensi perikanan lainnya. Udang menjadi peluang usaha yang menjanjikan, didukung dengan stok jenis bibit yang cukup banyak, jenis udang banana, udang harimau, dan udang lobster yang menjadi jenis andalan dalam produk yang satu ini. Ketersediaan stok bibit udang dalam jumlah yang besar karena didukung oleh topografi alam Aru yang berawa-rawa dengan hutan bakau merata hampir di seluruh pesisir pantai Aru.

Untuk udang banana dan harimau dapat hidup hampir di seluruh pesisir Aru, sedangkan udang lobster juga bisa hidup di wilayah laut yang cukup luas, sekitar 80% lebih dari Kepulauan Aru. Hal ini membuat ketersediaan stok pangan dan peluang usaha yang besar. Pasar potensial untuk komoditas ini adalah Bali, Jawa, dan manca negara dengan nilai permintaan dan ekonomis yang sangat tinggi.

Dari hasil udang, dapat diproduksi berbagai produk lainnya, seperti terasi udang asli. Keunggulan terasi udang Aru ini adalah murni diproses secara alami tanpa bahan pengawet atau zat kimia apapun.

Saat ini, terasi udang asli Aru mulai merambah berbagai pasar lokal di Maluku. Tentu saja patut dipertimbangkan sebagai salah satu sumber investasi yang pantas diperhitungkan untuk membantu perekonomian rakyat pesisir.

Sama halnya dengan udang, kepiting merupakan salah satu lahan bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan pangsa pasar domestik yang potensial seperti di Bali, Papua, Sulawesi, Jawa.

Kepiting juga tersedia dalam jumlah yang besar, walaupun pengusahannya oleh masyarakat masih bersifat tradisional dan dengan peralatan sederhana. ■



Rumput laut

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di tanah air terus dilakukan melalui berbagai macam program. Baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir sebagai modal usaha, pembangunan sarana dan prasarana dasar maupun pendampingan usaha. Namun semua itu dirasakan belum cukup karena masalah kemiskinan merupakan masalah kompleks yang sifatnya multidimensi.

Untuk itu majalah PROGRES menyajikan tulisan bersambung yang dikutip dari Pidato Prof. Dr. Mohammad Ikhsan yang berkaitan dengan masalah penanggulangan kemiskinan, disampaikan pada pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada akhir Nopember 2010 lalu.

Tulisan di bawah ini merupakan bab kedua dari tujuh bab pidato beliau yang berjudul Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Makro dan Penanggulangan Kemiskinan: Pertumbuhan Ekonomi Penting Tetapi Tidak Cukup. Berikut kutipannya.

Bab. II. Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Makro dan Penanggulangan Kemiskinan: Pertumbuhan Ekonomi Penting Tetapi Tidak Cukup

Bab 2

Studi ini menemukan pula persentase penduduk miskin kronis maupun miskin transien lebih tinggi di pedesaan dibandingkan penduduk di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa fokus program anti kemiskinan tetap harus berorientasi pedesaan dan sektor pertanian. Karakteristik ini memang menyulitkan karena biaya pelayanan publik untuk mengatasi kemiskinan akan cenderung lebih tinggi.

Yang menarik, studi ini menunjukkan bahwa peluang keluarga miskin keluar dari perangkap kemiskinan makin besar jika posisinya makin dekat dengan garis kemiskinan. Peluang ini cenderung lebih besar dialami keluarga yang tinggal di perkotaan dibandingkan yang tinggal di pedesaan. Pada saat yang sama peluang keluarga miskin tetap berada dalam status yang sama (apakah miskin sekali, miskin atau nyaris miskin) relatif rendah yaitu masing-masing 26%, 19% dan 18% dan jauh dibandingkan dengan peluang penduduk bukan miskin



Mohammad Ikhsan
Seri Khodas Wakil Presiden di
Guru Besar FE UI

yang tidak berubah statusnya yaitu sekitar 90%. Tetapi di desa peluang ini cenderung lebih tinggi yaitu masing-masing 30% untuk miskin sekali, 22% untuk miskin dan 21% untuk hampir miskin serta 64% untuk bukan miskin.

Ada beberapa pelajaran yang diperoleh dari pengalaman masa lalu dan karakteristik kemiskinan yang diuraikan di atas yang dapat digunakan sebagai bahan pe-

nyusunan kebijakan masa mendatang.

Pertama, mempertahankan momentum laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi prasyarat penting (necessary condition) dalam mendorong percepatan penurunan kemiskinan. Sebagaimana ditunjukkan oleh banyak studi bahwa komposisi sumber pertumbuhan ekonomi memegang peran yang penting dalam menentukan dampaknya terhadap penurunan kemiskinan. Sumber pertumbuhan harus terjadi pada sektor-sektor dimana orang miskin menggantungkan hidupnya. Pengalaman di era 1970an hingga pertengahan 1980an, ekspansi sektor pertanian baik melalui ekstensifikasi maupun peningkatan produktivitas telah berperan menurunkan jumlah orang miskin secara signifikan. Sementara sejak pertengahan 1980an hingga satu dekade, ekspansi sektor industri/manufaktur yang padat karya telah memfasilitasi transformasi ketenagakerjaan dan memunculkan penduduk miskin di sektor pedesaan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi

di sektor industri manufaktur dan sektor lain yang terkait dengan sektor ini. Proses ini dimungkinkan karena pemerintah telah membuat investasi yang sangat signifikan di bidang infrastruktur baik di bidang investasi sumber daya manusia (pembangunan fasilitas sekolah dan kesehatan) dan investasi bidang fisik. Pembangunan fasilitas ini dilakukan terutama di daerah pedesaan di Jawa, dimana daerah ini merupakan tempat tinggal sebagian besar orang miskin Indonesia. Manfaat dari pembangunan infrastruktur baru terealisasi setelah adanya perubahan kebijakan pemerintah dari *a trickle-down (growth) effect strategy* menjadi pembangunan sumber daya manusia dalam Pelita III. Di samping itu koreksi dalam kerangka ekonomi mikro yang dilakukan sejak tahun 1978 dengan melakukan penyesuaian nilai tukar (devaluasi) dan deregulasi sektor keuangan tahun 1983 dan 1988 serta deregulasi sektor perdagangan secara gradual telah membantu proses momentum pertumbuhan ekonomi ini dan berperan menurunkan kemiskinan secara signifikan secara luas. Singkatnya, salah satu dari empat pengalaman menunjukkan bahwa dampak positif pertumbuhan terhadap kemiskinan sangat tergantung dari pertumbuhan sektoral dan pola distribusi. Jika pertumbuhan terjadi di suatu sektor dimana kemiskinan di sektor tersebut sangat padat, maka pertumbuhan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Jika sumber pertumbuhan suatu sektor dapat mendorong pengentasan kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian maka penurunan kemiskinan akan terjadi sangat cepat (pada akhirnya sektor pertanian dapat meningkatkan produktivitasnya).

Pengalaman di masa lalu diperkirakan akan berlanjut, tetapi memerlukan

modifikasi dalam struktur dan komposisi sumber pertumbuhan ekonomi. Beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab. Pertama, apakah peningkatan produktivitas sektor pertanian masih dapat menjadi andalan dalam penurunan kemiskinan? Kedua, apakah sektor manufaktur harus selalu menjadi andalan bagi transformasi ketenagakerjaan dan sekaligus memindahkan penduduk miskin dari sektor pertanian?

Pertanyaan pertama masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut untuk mendapatkan jawabannya dan memerlukan teknik estimasi yang lebih kompleks karena penggunaan data historis tanpa memasukkan kendala ketersediaan tanah dan bobatan teknologi akan mengarah pada kesalahan dalam penentuan kebijakan. Tetapi jawaban spekulasi dari saya adalah ruang peningkatan produktivitas masih tersedia dengan pola yang berbeda. Di Jawa, peningkatan produktivitas lahan dapat ditingkatkan dengan transformasi dalam sektor pertanian sendiri menuju kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai tambah yang tinggi seperti hortikultura atau peternakan. Sementara di luar Jawa, ruang peningkatan produktivitas lahan masih tersedia dengan teknologi ada tetapi memerlukan investasi yang besar dalam perluasan jaringan irigasi.

Pertanyaan kedua menjadi menarik mengingat pengalaman di India, Cina dan Brazil yang menunjukkan bahwa pola pertumbuhan yang berbeda dapat menghasilkan dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Artinya tidak ada pola dan struktur pertumbuhan yang tunggal terhadap penurunan kemiskinan. Di Cina, penurunan kemiskinan didorong oleh ekspansi sektor pertanian

dan sektor manufaktur sementara di India lebih didorong oleh sektor jasa. Berbeda dengan Cina, India (dan juga Indonesia), penurunan kemiskinan di Brazil tidak didorong oleh pertumbuhan ekonomi. Intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan sosial serta stabilitas harga merupakan sumber penurunan kemiskinan (Bavillion, 2010a). Sementara studi lain menunjukkan pola komposisi sumber pertumbuhan ekonomi menjadi kurang penting. Ravallion (Ravallion, 2010b) misalnya menunjuk pengalaman India sebelum dan sesudah reformasi ekonomi 1991. Sebelum reformasi 1991, pertumbuhan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan menjadi sumber penurunan kemiskinan di India termasuk memberikan *spillover effect* bagi penurunan kemiskinan di perkotaan. Tetapi sesudah reformasi pengaruh ini berkurang dan berubah, dan ekspansi sektor perkotaan (terutama didorong oleh pertumbuhan sektor tersier) telah menjadi sumber penurunan kemiskinan dan secara bertahap telah memberikan *spillover effect* bagi penurunan kemiskinan di pedesaan.

Dua pertanyaan di atas memberikan beberapa indikasi yang memerlukan konfirmasi lebih lanjut yaitu pertumbuhan ekonomi tetap menjadi driver utama dalam penurunan kemiskinan dan komposisi sumber pertumbuhan sektoral menjadi kurang relevan di masa mendatang (Byerley, Janvry, dan Sadoulet, 2010). Di daerah pedesaan, penurunan kemiskinan akan lebih banyak didorong oleh pertumbuhan *non farm sector* sehingga pola pertumbuhan yang bersifat *broad based* dan seluas mungkin akan lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan di masa mendatang.

Bersambung

Keterangan

1. Miskin sekali didefinisikan jika pengeluaran per kapita per bulannya 20 persen atau lebih di bawah garis kemiskinan, miskin adalah jika pengeluaran per kapita hingga 20% di bawah garis kemiskinan dan nyaris miskin jika penduduk tersebut memiliki pengeluaran per kapita 20% di atas garis kemiskinan.
2. Proses transformasi ketenagakerjaan ini kurang lebih memfiksikan apa yang pernah diungkapkan oleh pemenang Nobel Sir Arthur Lewis dalam publikasinya tahun 1954 dan kemudian dipegang oleh John Harris dan Michael Todaro - yang kemudian dikenal dengan Harris Todaro Model.
3. Salah satu kegagalan mekanisme pasar yang menimbulkan masalah kemiskinan adalah ketidaksempurnaan informasi yang kemudian menyebabkan akses penduduk miskin ke pasar kredit berkurang lebih tertunda. Masalah missing market merupakan contoh lain dari kegagalan mekanisme pasar yang mengakibatkan munculnya masalah kemiskinan.

Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih

Oleh RIAN HK

Sebuah "gunung nasi" warna kecoklatan menjulang diatas penggorengan besar. Bau bumbu kare bercampur daging kambing merebak disekitarnya. Menggugah selera ingin mencicipi. Itulah nasi goreng kambing Kebon Sirih yang terkenal seantero Jakarta.



Usaha nasi goreng kambing Kebon Sirih ini, menurut Hadi "si powaris tuhi" mulai dirintis oleh orang tuanya H. Nain (alm) sejak tahun 1958. Dari pertama kali dibuka hingga sekarang, tak banyak mengalami perubahan menu. Yaitu Nasi Goreng, Sate, dan Sop, yang kesemuanya berbahan baku sama yakni daging kambing. "Kalau mau dihitung, mungkin sudah jutaan ekor kambing yang menjadi "korban" usaha ini", kata Hadi sedikit berkelakar.

Tetapi mengingat tidak semua orang suka makan daging kambing maka sekarang Hadi juga menyediakan menu berbahan daging ayam seperti nasi goreng ayam dan sate ayam. Meski begitu menu terfavorit yang selalu dicari pelanggan tetap saja nasi goreng kambing.

Terbukti dari jumlah bahan baku daging yang digunakan. Untuk nasi goreng kambing saja bisa menghabiskan 30 hingga 40 kg daging kambing dalam semalam. Sedangkan untuk menu berbahan baku daging ayam hanya menghabiskan beberapa ekor ayam saja.



Hadi

Dalam satu malam Hadi mampu menjual sekitar 300 hingga 400 porsi. Itu artinya ada 3 sampai 4 "gunung nasi" tandas semalaman disikat para pelanggannya. Untuk malam-malam tertentu, misal nya malam minggu atau malam hari libur, porsi tersebut bisa lebih banyak lagi. Bahkan "pim byang-nya" pun jauh lebih lama yakni sampai pukul 3.00 dini hari. "Karena semakin malam justru semakin banyak orang yang datang", jelas Hadi.

Untuk mengantisipasi, Hadi menyiapkan kursi dan meja plastik tambahan yang bisa ditata dengan cepat. Sedang-

kan untuk tempatnya Hadi tidak terlalu risau, karena arealnya masih terbuka luas dalam radius belasan meter di Jalan Kebon Sirih Barat.

Hadi memang sengaja menciptakan suasana ruang terbuka dan santai bagi pelanggannya. Tanpa penyekat ataupun tenda payung. Sehingga seringkali bermasalah bila hujan turun malam hari. Namun pada bagian lain ada juga tenda yang digelar sepanjang sekitar 30 meteran. Berisi meja dan bangkir panjang disusun berjajar. Biasanya itu digunakan untuk pelanggan yang sekedar makan. Sedangkan untuk yang ingin sedikit santai setelah makan, bisa menggunakan meja dan kursi plastik yang digelar di pinggir jalan. Tetapi banyak juga pelanggan yang menikmati nasi goreng di dalam kendaraannya sendiri.

Pelanggan

Menurut Hadi, pelanggan nya itu terdiri dari berbagai kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, tokoh masyarakat, hingga pejabat tinggi negara dari ber-



bagai masa pemerintahan. Tak jarang para selebriti, suka "nongkrong" di situ sambil menikmati menu yang ada. Baik secara terang-terangan duduk bersama di bangku panjang ala koki lama ataupun yang sembunyi-sembunyi makan dalam kendaraannya.

Tentang pelanggannya, Hadi bertutur ada juga pelanggannya yang berasal dari zaman "be-heulu" masih suka makan di situ. Dimana harga nasi goreng kambing waktu itu masih dibanderol Rp. 500,-/porisi. Sedangkan pada tahun 1990 harganya sudah Rp. 3.500,-/porisi. Bandingkan de-

ngan harga sekarang yang sudah mencapai Rp. 21.000,-/porisi.

Untuk jenis pelanggan, Hadi membaginya menjadi 3 kategori berdasarkan waktu. Pembeli pada jam 17.00 hingga 19.00 biasanya karyawan kantor yang lembur, itupun dibungkus. Jam 19.00 sampai 21.00, untuk karyawan yang pulang kantor. Sedangkan pukul 21.00 keatas, umumnya masyarakat yang mencari hiburan atau kalangan muda 'gaol'.

Menyerap Tenaga Kerja

Untuk melayani ratusan pelanggannya itu, Hadi mempekerjakan sekitar 20 orang pelayan. Semuanya lelaki. Mulai dari mengolah nasi goreng, membuka sate hingga yang menyapukannya ke meja makan. Tidak ada satupun pekerja perempuan. Bukan karena masalah gender tetapi lebih disebabkan kondisi waktu malam hari dan tempat usahanya yang di ruang terbuka.

Untuk memudahkan layanan bagi para pelanggannya itu, Hadi melayani para pelayannya dengan seragam oranye bertuliskan Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih.

Bumbu Racikan

Masalah bumbu racikan, tidak berbeda dengan nasi goreng kambing lainnya, kata Hadi.

Namun, memang ada resep khusus yang sulit dijelaskan, karena itu berasal dari penemuan hasil eksperimen yang dilakukan orang tuanya. "Bapak saya dulu bereksperimen tentang bumbu nasi goreng yang cocok dengan campuran daging kambing. Dengan takaran yang pas sehingga menghasilkan rasa yang cocok untuk semua lidah orang. Untuk itu tekstur bumbunya

pun agak sedikit berbeda antara nasi goreng kambing dengan nasi goreng ayam," jelas Hadi.

Setelah orangtuanya meninggal, Hadi kemudian meracik sendiri bumbu Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih yang diambil dari resep leluhur. Dengan kombinasi dan ukuran yang tepat, Hadi mengklaim resepnya tersebut tidak akan jatuh ke tangan orang lain.

Membuka Cabang

Kesuksesan usaha nasi goreng kambing Kebon Sirih yang ditekuni sejak puluhan tahun itu, membuat Hadi melakukan pengembangan dengan membuka cabangnya di tempat lain. Sudah ada 4 cabang yang berhasil dibuka di berbagai tempat. Misalnya di daerah Karang Tengah, Ciledug, Pasar Raya Blok M, Bulungan, dan Pamulang.

Namun tidak banyak orang tau bahwa di balik kesuksesan usaha yang bertajuk Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih itu awalnya adalah bernama Kodai Sate Sular. Tempatnya pun tidak seperti yang kita kenal sekarang. Melainkan di depan Apotik Gamla dekat pertigaan Jalan Sabang yang sekarang berubah menjadi sebuah Cafe. Ditulahi oleh bakal usaha yang didirikan oleh Pak Sular atau nama aslinya pak H. Neni.

Nah, bagi anda yang ingin merasakan lezatnya nasi goreng kambing kebon sirih, bisa memilih waktu yang tepat untuk datang. Apakah sore hari bersamaan dengan karyawan yang lembur atau malam hari dengan kalangan kaum muda 'gaol'?

Harganya pun dijamin tidak bakal menguras es dompet. Misalnya nasi goreng kambing/ayam cuma Rp21.000,-/porisi. Sate Kambing Rp. 35.000,- Sate Ayam Rp. 20.000,- sedangkan sop kambingnya hanya Rp. 15.000,- ■



KEGIATAN TNP2K

MARET 2011

1 Maret 2011	Laporan Kegiatan Pokja
1 Maret 2011	Rapat TNP2K dengan CSR, Freeport dan MDN
1 Maret 2011	Rapat Internal TNP2K
3 Maret 2011	Rapat Pelaksanaan Pelaksanaan Program pada Tingkat Kabupaten
7 Maret 2011	Rapat Masil Rajon PMS, TNP2K Mandiri dan Maney
13 Maret 2011	Kajian Pemantauan Questioner TPI-5M dan Pengujian Sistem Statistik Data dan Program Berbasis
16 Maret 2011	Rapat Focus Group dan Diskusi Intensi No. 3/2010 sebagai dasar laporan ke UPTK
16 Maret 2011	Rapat Internal TNP2K
21 Maret 2011	Rapat Internal TNP2K
23 Maret 2011	Rapat Community Mapping dengan Rukun
25 Maret 2011	Rapat Fokus Grouping Data dan Substansi
28 Maret 2011	Rapat dengan World Bank
29 Maret 2011	Rapat dengan World Bank
18 Maret 2011	Rapat TNP2K dengan SIA/RI
30 Maret 2011	Rapat TNP2K dengan BUK
30 Maret 2011	Rapat pemantauan Pokja



www.pnp2k.org



42 Fokus Rukun Mandiri, Rong Karsidi sebagai perwakilan kelompok komunikasi pemantauan program pada tingkat Rukun Mandiri di Kabupaten Gorontalo. Kegiatan Questioner TNP2K Kecamatan Mawassi.

44

Pemerintah Kabupaten Kotabaru TNP2K sedang menyelenggarakan kegiatan tentang kegiatan Pokja kepada Sekretaris DKBK.



Sampai: Reklamasi Candi Ani oleh warga setempat
penelitian ahli di lokasi di Kecamatan Sumbawa
Kabupaten Bagan, Provinsi Jawa Tengah
Bumi oleh warga setempat, Candi Ani, Kabupaten

Program **Cash for Work**

Program *Cash for Work* telah membantu warga yang tertimpa musibah bencana erupsi Gunung Merapi. Program ini juga memulihkan semangat penduduk untuk kembali menata kehidupan mereka.

TAHAP I

Jumlah Kabupaten	4 kabupaten
Jumlah Kecamatan	10 kecamatan
Jumlah Desa	48 desa
Tenaga Kerja Terserap	18,294 orang
Jumlah Hari Orang Kerja	207.353 HOK
Jumlah Kelompok	577 Kelompok



TNP2K TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN